

RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN ANGGARAN 2026

**DINAS PERTANIAN
TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
PROVINSI SUMATERA SELATAN**



“Sumatera Selatan Sejahtera, Unggul dan Terdepan”

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan ke hadirat Allah SWT karena atas rahmat dan ridho-Nya, maka Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Organisasi Perangkat Daerah Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan dapat diselesaikan dengan baik.

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) SKPD Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan ini merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (RENSTRA) dan menjadi acuan segenap satuan kerja di lingkungan Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan. Rencana Kerja (RENJA) ini disusun untuk menghasilkan rumusan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan 1 (satu) tahun yang akan datang serta sebagai dokumen perencanaan jangka pendek (Tahunan) untuk mensukseskan program-program yang telah direncanakan.

Pada kesempatan ini pula, kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu memberikan data-data dan masukan sehingga RENJA ini dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu. Demikian, semoga dokumen RENJA ini dapat bermanfaat sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan 1 (satu) tahun ke depan.

Palembang, 1 Desember 2025

Kepala Dinas,



Dr. Ir. H. Bambang Pramono, M.Si
Bendahara Utama Muda (IV/c)
NIP. 196703151990031004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vi
I. PENDAHULUAN	1
I.1. Latar Belakang	1
I.2. Landasan Hukum	8
I.3. Maksud dan Tujuan.....	13
1.3.1 Maksud	13
1.3.2 Tujuan	14
I.4. Sistematika Penulisan	15
II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH	17
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.....	17
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD	25
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD	39
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD	47
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	54
III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	56
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional Terkait Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan	56

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan	61
IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....	66
4.1 Faktor-faktor yang Menjadi Bahan Pertimbangan terhadap Rumusan Program dan Kegiatan	66
4.2 Program dan Kegiatan Tahun 2025	71
V. PENUTUP	75

DAFTAR TABEL

Tabel II.1	Target dan Realisasi Tertib Administrasi dan Pemerintahan Tahun 2023 dan Tahun 2024.....	19
Tabel II.2	Capaian Kinerja Produksi dan Produktivitas Tanaman Pangan, Tanaman Hortikultura dan Tanaman Obat	21
Tabel II.3	Realisasi Produksi Tanaman Pangan, Tanaman Hortikultura dan Tanaman Obat Tahun 2023-2024 ..	24
Tabel II.4	Rumusan Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan.....	26
Tabel II.5	Indeks Pertanaman Tanaman Padi di Sumatera Selatan	40
Tabel II.6	Luas Baku Sawah, LP2B dan IP Tahun 2024 Provinsi Sumatera Selatan.....	41
Tabel II.7	Luas Baku Sawah, IP Tahun 2024 Provinsi Sumatera Selatan	42
Tabel II.8	Bantuan Benih dan Saprodi Pengembangan Padi Tahun 2021-2025	42
Tabel II.9	Luas Serangan OPT Tanaman Pangan dan Hortikultura Tahun 2020-2024	43
Tabel II.10	Karakteristik Luas Baku Sawah Provinsi Sumatera Selatan	43
Tabel II.11	Luas Area Terdampak Perubahan Iklim Tahun 2020-2024	44
Tabel II.12	Rencana Strategis Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029	46
Tabel III.1	Isu-Isu Strategis dan Permasalahan PD di Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan.....	59
Tabel III.2	Arah kebijakan Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025-2029	62

Tabel III.3	Tujuan-Sasaran Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025-2030	64
Tabel IV.1	Jumlah Penduduk Miskin Maret Menurut Kab/Kota (Ribu Jiwa), 2025	70
Tabel T-C.31	Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 Provinsi Sumatera Selatan	48
Tabel T-C.32	Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027 Provinsi Sumatera Selatan	77

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Potensi Sumber daya alam dalam bidang pertanian di Sumatera Selatan terbilang cukup besar, hal ini ditandai dengan beberapa daerah kabupaten dan kota di Sumatera Selatan yang merupakan produsen hasil pertanian tanaman pangan, perkebunan, dan hortikultura. Tanaman pangan yang utama adalah pertanian padi, sayur-sayuran dan buah-buahan terutama pisang dan duku, serta beberapa tanaman perkebunan seperti kopi, karet, kelapa sawit, dan teh. Kabupaten sentra produksi beras adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (OKU Timur), Ogan Komering Ilir, Banyuasin dan Musi Banyuasin terletak di dataran rendah sekitar 40-80 meter diatas permukaan laut (dpl). Sedangkan Kabupaten Musi Rawas, OKU, OKU Selatan, Muara Enim, Kota Prabumulih, dan Kota Pagar Alam merupakan sentra perkebunan karena letak tofografi dataran tinggi yang berkisar 80-800 meter dpl.

Sektor pertanian memiliki kontribusi yang besar dalam pembentukan PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) Sumatera Selatan. Sektor pertanian ini termasuk ke dalam tiga sektor terbesar yang menyokong PDRB setelah sektor industri pengolahan, serta sektor pertambangan dan penggalian.

Peranan sektor pertanian bukan saja terhadap ketahanan pangan, tetapi juga memberikan andil yang cukup besar terhadap kesempatan kerja. Sektor pertanian merupakan sektor yang paling banyak menyerap tenaga kerja. Oleh karena itu, perkembangan sektor pertanian ke depan harus lebih di tingkatkan guna peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan.

Potensi Provinsi Sumatera Selatan di bidang pertanian dalam arti luas masih sangat terbuka untuk ditingkatkan baik melalui intensifikasi, ekstensifikasi dan peningkatan efisiensi dan kualitas hasil panen, karena didukung oleh sumber daya lahan dan air yang memadai. Pembangunan pertanian tanaman pangan dan hortikultura merupakan bagian penting dari pembangunan nasional yang berorientasi pada peningkatan kemampuan petani untuk menuju kemandirian sehingga tingkat pendapatan dan kesejahteraannya semakin meningkat. Pembangunan pertanian di Sumatera Selatan dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja dan pengentasan kemiskinan. Dalam mendukung pertumbuhan ekonomi kontribusi sektor pertanian mempunyai peran yang paling dominan, disisi tenaga kerja sektor ini juga paling dominan dalam penyerapan tenaga kerja, sedangkan dalam mendukung pengentasan kemiskinan kebanyakan jumlah keluarga miskin bermukim di pedesaan dan bermata pencaharian sebagai petani penggarap atau buruh tani, sehingga output di sektor ini secara tidak langsung akan meningkatkan pendapatan keluarga petani penggarap.

Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan yang selanjutnya disingkat Dinas Pertanian TPH adalah dinas yang bertugas membantu Gubernur dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pertanian tanaman pangan dan hortikultura, termasuk penyuluhan. Dinas ini juga bertanggung jawab dalam melaksanakan kewenangan desentralisasi dan dekonsentrasi di bidang tersebut.

Dinas Pertanian TPH adalah Perangkat Daerah atau Organisasi atau Lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Karena itu salah satu tugas Perangkat Daerah adalah membuat Rencana Kerja atau Renja. Renja Perangkat Daerah merupakan pedoman bagi

Perangkat Daerah dalam menyusun perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. Perencanaan pembangunan adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.

Laporan evaluasi hasil rencana kerja Perangkat Daerah adalah laporan yang berisi hasil evaluasi dari rencana kerja yang telah disusun oleh Perangkat Daerah selama satu tahun yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 dan RKPD.

Dalam prosesnya, penyusunan rancangan Renja OPD mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Oleh karena itu penyusunan rancangan Renja OPD dapat dikerjakan secara simultan dengan penyusunan rancangan awal RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting OPD, evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra OPD. Tahap penetapan rancangan akhir Rencana Kerja OPD dilakukan dengan pengesahan oleh Kepala Daerah, selanjutnya Kepala OPD menetapkan Renja OPD untuk menjadi pedoman di lingkungan OPD dalam menyusun program dan kegiatan prioritas OPD pada tahun anggaran berjalan.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, telah mewajibkan setiap Organisasi Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menerjemahkan

perencanaan strategis lima tahunan yang tertuang dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Penyusunan Renja Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan mengacu pada rancangan awal RKPD dan RPJMD Provinsi Sumatera Selatan, Rancangan Renstra 2025-2029 Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan serta usulan dari masyarakat. Sebagai Dinas yang mempunyai tugas membantu Gubernur dalam melaksanakan kewenangan Pemerintah Daerah di bidang Pertanian, maka kebijakan yang diambil dalam penyusunan Renja Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan selalu diselaraskan dengan kebijakan umum Kepala Daerah dan Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Pertanian sebagai pembantu Presiden dalam mencapai visi dan misi nasional. Dengan demikian diharapkan dapat menentukan arah perkembangan dalam meningkatkan kinerjanya, yang mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik lokal regional, nasional, maupun global.

Presiden dan Wakil Presiden terpilih, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka mengusung Visi **‘Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045’**. Visi itu akan diwujudkan dengan 8 misi yang disebut **Asta Cita**. Berikut **Asta Cita** Prabowo-Gibran :

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.

3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan Makmur.

Sedangkan Visi Kementerian Pertanian (Kementan) di tahun 2025 adalah "**Pertanian yang Maju, Mandiri dan Modern untuk Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong**". Untuk mewujudkan visi tersebut, ada tiga misi utama Kementan, yaitu:

- 1) Mewujudkan ketahanan pangan dan gizi,
- 2) Meningkatkan nilai tambah dan daya saing pertanian, serta
- 3) Mewujudkan kesejahteraan petani.

Pembangunan pertanian dengan pendekatan kawasan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2024 Tentang Pengembangan Kawasan Pertanian, yang selanjutnya pengembangan lokus tersebut disesuaikan dengan potensi

komoditas yang ada dimasing-masing provinsi sesuai dengan Kepmentan 472 Tahun 2018 tentang Lokasi Kawasan Pertanian Nasional, dimana provinsi Sulsel, Jateng dan Kaltim sebagai kawasan padi nasional. Kawasan pertanian nasional tersebut dikembangkan untuk komoditas prioritas sub sektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan sesuai dengan arah dan kebijakan Kementerian Pertanian.

Visi dan misi Kementerian Pertanian (Kementan) untuk periode 2025-2029 mengacu pada tujuan pembangunan pertanian yaitu mewujudkan kemandirian energi dan pangan, serta menjadi lumbung pangan dunia, dengan misi mencapai ketahanan pangan dan gizi, meningkatkan nilai tambah dan daya saing komoditas pertanian, mewujudkan kesejahteraan petani, serta membangun Kementan yang transparan, akuntabel, profesional, dan berintegritas tinggi.

Perencanaan pembangunan pertanian merupakan perencanaan pembangunan daerah dari segi pertanian. Proses perencanaan pembangunan pertanian sejalan dengan proses perencanaan pembangunan daerah. Kegiatan perencanaan merupakan titik awal dalam menentukan keberhasilan dari sebuah pelaksanaan misi organisasi pemerintah. Organisasi pemerintah dituntut agar dapat membuat Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) yang jelas dan terukur dalam melakukan setiap kegiatan pembangunan. Dokumen Renja-SKPD tersebut merupakan dokumen resmi yang digunakan sebagai bahan dasar dalam pengusulan kegiatan dan anggaran penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

Renja Dinas Pertanian TPH Provinsi Sumatera Selatan ini merupakan dokumen perencanaan yang berisikan arahan, tujuan, target, sasaran, kebijakan, strategi, program dan kegiatan pembangunan pertanian yang akan dilaksanakan oleh

Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan untuk 1 (satu) tahun ke depan (Tahun 2026).

Dokumen ini disusun berdasarkan analisis strategis atas potensi, peluang, permasalahan mendasar dan tantangan terkini yang dihadapi pembangunan pertanian untuk jangka waktu 1 (satu) tahun ke depan. Oleh karena itu, dokumen Renja ini sudah sepatutnya dijadikan acuan Dinas Pertanian TPH Provinsi Sumatera Selatan dalam melaksanakan program dan kegiatan pembangunan pertanian tahun 2026 secara menyeluruh, terintegrasi, efisien dan bersinergi baik di dalam maupun antar sektor terkait. Dokumen ini dilengkapi dengan indikator kinerja sehingga akuntabilitas pelaksana beserta organisasinya dapat dievaluasi pada tahun tersebut. Rencana Kerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan ini memuat program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2026.

Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri mengharuskan Pemerintah Daerah untuk menyusun Dokumen Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2024-2026 yang selanjutnya disebut sebagai Rencana Pembangunan Daerah Provinsi (RPD) tahun 2025-2029. Selanjutnya seluruh Perangkat Daerah diperintahkan untuk menyusun Rencana Strategis Pemerintah Daerah (Renstra) Tahun 2025-2029. Kemudian mewajibkan setiap SKPD membuat dan memiliki Rencana Kerja (Renja) SKPD, yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra SKPD dan mengacu kepada RKPD. Dokumen-dokumen inilah yang akan digunakan Gubernur Provinsi Sumatera Selatan sebagai Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah.

Rencana Kerja untuk tahun 2026 akan menyelaraskan Visi Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih 2024-2029 **“Sumsel Maju Terus untuk Semua”** dengan 7 (Tujuh) Misi. Dinas Pertanian TPH sesuai dengan Tugas dan Fungsi Pokoknya mengakomodir **Misi Kedua** yaitu **Mewujudkan Ketahanan**

Ekonomi Berbasis Sumber Daya Lokal dan Berkelanjutan dalam Kerangka Ekonomi Kerakyatan yang Berkeadilan untuk Meningkatkan Pendapatan Masyarakat serta **Misi Kedua**, yaitu ***Mewujudkan Keterkaitan (Nexus) antara Ketahanan Pangan, Ketahanan Energi dan Kedaulatan Air sebagai Upaya Mengatasi Perubahan Iklim.***

Tahun 2026 pembangunan pertanian di Sumatera Selatan juga masih mengakomodir optimasi lahan rawa dan cetak sawah. Optimasi lahan rawa dan cetak sawah merupakan program Kementerian Pertanian (Kementan) untuk meningkatkan luas area pertanian dan produktivitas tanaman pangan. Program ini juga diharapkan dapat mewujudkan swasembada pangan nasional yang merupakan bagian dari langkah strategis Kementerian Pertanian dalam meningkatkan produktivitas pangan di Indonesia.

Sesuai dengan amanat tersebut, maka Dinas Pertanian TPH Provinsi Sumatera Selatan sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah menyusun Dokumen Rencana Kerja Dinas Pertanian Tahun 2026. Rencana Kerja ini merupakan dokumen rencana pembangunan SKPD yang berjangka waktu 1 (satu) tahun sebagai pelaksanaan dari Rencana Strategis Dinas Pertanian Tahun 2025 - 2029 serta sebagai evaluasi dari pelaksanaan Rencana Kerja Perubahan Dinas Pertanian TPH Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 sesuai dengan tugas dan fungsi dari SKPD. Rencana Kerja Dinas Pertanian TPH Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026 ini sekaligus sebagai pelaksanaan dari RPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029 dari urusan Pertanian.

1.2. Landasan Hukum

Renja SKPD Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026 disusun dengan berdasarkan pada:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865);
6. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
8. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6323);
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2018;
14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
15. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
16. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan RKPD Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri

Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

24. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
25. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2005-2025;
26. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan Sebagaimana Telah Diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan;
27. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 41 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas, dan Fungsi Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan;
28. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019-2023;
29. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2045 (Lembar Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 Nomor 7);

30. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029;
31. Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Nomor 41 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas, dan Fungsi Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan;
32. Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Uraian Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas di Lingkungan Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan;
33. Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Nomor 43 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026;
34. Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Nomor 32 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Daerah Tahun 2025-2029;
35. Keputusan Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Nomor 872 Tahun 2025 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029.

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Maksud penyusunan Renja Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026 dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Memberikan arah dan pedoman bagi seluruh personil/aparat dinas dalam melaksanakan tugasnya untuk menentukan prioritas-prioritas di Bidang Tanaman Pangan dan Bidang Hortikultura sehingga tujuan program dan sasaran kegiatan yang telah ditetapkan untuk tahun 2026 dapat tercapai.
2. Mempermudah kontrol, koordinasi, analisa, monitoring dan evaluasi kegiatan baik secara internal maupun eksternal.
3. Memberikan informasi kepada pemangku-pemangku kepentingan (*stakeholders*) tentang rencana pembangunan di sektor pertanian dan kehutanan.
4. Menjadikan kerangka dasar dalam upaya peningkatan kualitas pembangunan di bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura.
5. Mewujudkan sinkronisasi pembangunan antara rancangan teknokratik RPJMD Provinsi Sumatera Selatan dengan rancangan Renstra 2025-2029 Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan.

1.3.2. Tujuan

Tujuan penyusunan Renja Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026 dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Acuan Dinas Pertanian TPH Provinsi Sumatera Selatan dalam mengoperasionalkan RKPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai visi dan misi Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

2. Sebagai dasar dalam perumusan program dan kegiatan pembangunan pertanian dalam arti luas pada Dinas Pertanian TPH Provinsi Sumatera Selatan selama Tahun 2026.
3. Acuan Dinas Pertanian TPH Provinsi Sumatera Selatan terhadap target pencapaian yang tertuang dalam Renstra Dinas Pertanian TPH Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029.

1.4. Sistematika Penulisan

Renja Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026 disusun dengan sistematika penulisan:

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Memuat tentang Renja SKPD, proses penyusunan Renja SKPD, keterkaitan antara Renja SKPD dengan Dokumen RKPD dan Renstra SKPD.

1.2. Landasan Hukum

Menguraikan apa yang menjadi Landasan Hukum di dalam penyusunan Renja Dinas Pertanian Tahun 2025.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja SKPD.

1.3.1. Maksud

1.3.2. Tujuan

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja SKPD, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD
- 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

- 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKP

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

- a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan
- b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan
- c. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif maupun kombinasi keduanya.

BAB IV PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Indikator kinerja adalah merupakan pengukuran kinerja yang akan dicapai oleh Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura periode Rencana Strategis Tahun 2025-2029. Pengukuran kinerja merupakan salah satu tolak ukur keberhasilan dan/atau kegagalan dari pelaksanaan pelayanan kedinasan yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan, yang secara operasional dilaksanakan setiap tahun melalui program dan kegiatan.

Pengertian Evaluasi Kinerja adalah analisis hasil capaian kinerja untuk mencari hubungan sebab akibat antara pelaksanaan kegiatan/program dan hasilnya, disamping mengidentifikasi dan memilih permasalahan serta menjelaskan hasil pengukuran kinerja (kegagalan dan keberhasilan). Tujuan dari evaluasi kinerja adalah untuk mengetahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai, sehingga dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan dan pelaksanaan program kegiatan di masa yang akan datang.

Evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dimaksudkan untuk mengetahui dan menilai apakah pelaksanaan rencana pembangunan sudah sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan, untuk mengetahui kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan di lapangan dan untuk bahan pertimbangan apakah program dan kegiatan tersebut sudah mencapai target sasaran sehingga tidak perlu lagi untuk direncanakan pada tahun berikutnya. Fokus utama evaluasi diarahkan pada pelaksanaan rencana pembangunan dan

pencapaian target kinerja berdasarkan tolak ukur yang ditetapkan pada saat penyusunan perencanaan.

Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan-kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja (Renja) Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura pada tahun yang lalu dan membandingkan dengan capaian sesuai target jangka menengah.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026 adalah dokumen perencanaan yang berisi program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dalam satu tahun anggaran, dengan mempertimbangkan perubahan yang perlu dilakukan dari rencana awal. Proses penyusunan suatu perencanaan erat kaitannya dengan proses evaluasi, dari hasil evaluasi dapat teridentifikasi dua hal yaitu sejauh mana proses perencanaan pembangunan dilaksanakan oleh seluruh SKPD dan permasalahan-permasalahan yang menghambat pelaksanaan perencanaan pembangunan tersebut. Hasil evaluasi tersebut sangat penting sebagai bahan masukan untuk menentukan kebijakan-kebijakan perencanaan pembangunan di tahun-tahun mendatang. Evaluasi kinerja untuk pelaksanaan kegiatan rencana kerja tahun lalu dan capaian Renstra adalah sebagai umpan balik (*Feed Back*) kinerja yang telah dilaksanakan guna untuk mendorong adanya produktivitas kinerja di masa yang akan datang.

Kualitas Renja Perangkat Daerah yang disusun sangat berpengaruh terhadap kualitas rencana pembangunan daerah, yaitu untuk memastikan kesinambungan program dan kegiatan dalam pencapaian visi dan misi daerah yang telah ditetapkan. Dalam menyusun Renja yang berkualitas diperlukan adanya evaluasi terhadap pelaksanaan Renja sebelumnya, yang dikaitkan dengan pencapaian Renstra perangkat daerah. Adapun capaian untuk masing-masing sasaran dan indikator kinerja adalah sebagai berikut:

1. Tertib Administrasi dan Tata Pemerintahan

Pencapaian sasaran tertib administrasi dan tata pemerintahan pada tahun 2023 dan tahun 2024 dilaksanakan melalui 7 indikator sasaran pada Tabel II.1 sebagai berikut:

Tabel II.1. Target dan Realisasi Tertib Administrasi dan Pemerintahan Tahun 2023 dan Tahun 2024

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2023			Tahun 2024		
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Persentase Perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (%)	%	100	92,80	92,80	100	99,74	97,31
2.	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (%)	%	99,98	96,40	96,40	100	95,34	97,66
3.	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah (%)	%	100	99,62	99,62	100	99,66	99,83
4.	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (%)	%	100	5,12	5,12	100	98,93	99,46

5.	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah (%)	%	100	75,44	75,44	100	99,34	99,64
6.	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (%)	%	100	100	100	100	79,84	88,91
7.	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (%)	%	100	98,01	98,01	100	90,03	94,68

Untuk tahun 2023 pencapaian untuk sasaran tertib administrasi dan tata pemerintahan hanya tercapai 81,10% melalui 7 (tujuh) indikator kinerja hal ini dikarenakan pada tahun 2023 TPP Bulan Desember 2023 tidak dibayarkan dan ada beberapa kegiatan yang belum dibayarkan sehingga menjadi hutang yang dibayarkan pada tahun 2024. Untuk tahun 2024 dengan indikator kinerja yang sama dengan tahun 2023 pencapaian untuk sasaran tertib administrasi dan tata pemerintahan naik dan mencapai nilai 96,78%

2. Produksi Tanaman Pangan Strategis

Capaian produksi tanaman pangan tahun 2023-2024 berfokus pada peningkatan produksi, produktivitas dan mutu hasil tanaman pangan. Kegiatan ini menjadi terobosan dalam rangka mendukung mewujudkan kedaulatan dan ketahanan pangan. Kegiatan pengembangan padi, jagung, kedelai dan pangan lokal, pengelolaan perbenihan, pengendalian OPT, dan Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP) berbasis korporasi petani menjadi suatu terobosan untuk mengubah sistem pertanian yang kurang produktif menjadi lebih produktif. Program peningkatan produksi, produktivitas dan mutu hasil

tanaman pangan menjadi salah satu pendukung agenda pembangunan pertanian yang mampu mendongkrak dan berkontribusi nyata terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Selatan.

➤ **Capaian Kinerja Produksi Tanaman Pangan, Tanaman Hortikultura dan Tanaman Obat**

Tabel II.2 Capaian Kinerja Produksi Tanaman Pangan dan Tanaman Hortikultura

No	Indikator Kinerja	Satuan	Produksi Tahun 2024		Capaian Tahun 2024 (%)
			Target	Realisasi	
TANAMAN PANGAN					
1.	Padi	Ton	2.846.938	2.909.412	102,19
2.	Jagung	Ton	768.706	833.952	108,49
3.	Kedelai	Ton	34,65	865	2.496,4
TANAMAN HORTIKULTURA					
1.	Jeruk Siam	Ton	54.173,12	68.709,15	126,83
2.	Nanas	Ton	140.108,93	287.523,84	205,21
3.	Cabai	Ton	17.865,65	15.270,21	(85,47)
4.	Bawang Merah	Ton	1.108,63	896,50	(80,86)

Berdasarkan data yang disajikan pada tabel II.2 di dapat data bahwa capaian kinerja produksi padi pada tahun 2024 berdasarkan Data KSA (Kerangka Sampel Area) adalah sebesar 2.909.412 ton. Jika dilihat dari capaian tersebut, capaian produksi tanaman pangan melampaui target yang ditetapkan pada Renstra 2024-2026.

Terkait dengan produksi tanaman pangan terutama pada tanaman padi dikarenakan adanya penggunaan benih unggul bermutu (Bantuan Pemerintah), percepatan tanam khususnya di wilayah Rawa baik Rawa Lebak maupun Rawa Pasang Surut, penerapan teknologi spesifik lokasi, penggunaan alsintan pertanian untuk mempercepat proses produksi dan mengurangi susut hasil serta adanya pendampingan dari tenaga pendamping di Lapangan (PPEP).

Tercapainya produksi tanaman pangan dan tanaman hortikultura di Tahun 2024 juga tidak terlepas dari Dukungan Pemerintah melalui Program dan Kegiatan yang dilaksanakan di

Dinas Pertanian TPH Provinsi Sumatera Selatan baik yang berasal dari Dana APBD maupun Dana APBN.

❖ Kegiatan yang berasal dari Dana APBD, diantaranya:

✓ Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian

1. Kegiatan Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian

- Penyediaan Sarana Produksi Pengembangan Tanaman Padi;

2. Kegiatan Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman

- Perbanyak Benih Unggul Padi di Balai Benih Induk;

❖ Kegiatan yang berasal dari Dana APBN, diantaranya:

1. Kegiatan Pengelolaan Sistem Perbenihan Tanaman Pangan berupa :

▪ Satuan Kerja (SATKER) Tanaman Pangan :

✓ Kawasan Padi (Padi Lahan Kering seluas 13.000 Ha), antara lain berada di :

- Kabupaten OKU Timur seluas 3.000 Ha;
- Kabupaten Banyuasin seluas 5.000 Ha;
- Kabupaten OKI seluas 3.000 Ha;
- Kabupaten Musi Banyuasin seluas 5.000 Ha,
- Kabupaten Musi Rawas seluas 1.000 Ha.

✓ Kawasan Jagung (seluas 5.000 Ha), antara lain :

- Kabupaten Empat Lawang seluas 600 Ha;
- Kabupaten Musi Banyuasin seluas 1.000 Ha;
- Kabupaten OKU seluas 1.000 Ha;
- Kabupaten OKU Selatan seluas 1.000 Ha;
- Kabupaten OKI seluas 400 Ha;
- Kabupaten OKU Timur seluas 1.000 Ha.

2. Pengelolaan Produksi Tanaman Serealia (Tanaman Pangan) :

✓ Kawasan Padi Kaya Gizi (Padi *Biofortifikasi*) seluas 1.500, antara lain :

- Kabupaten Muara Enim seluas 1.000 Ha dan
- Kabupaten Musi Rawas seluas 500 Ha.

3. Kegiatan Mandiri Benih Tanaman Pangan, berupa :
 - ✓ Area Penyaluran Benih Padi (Padi Inbrida seluas 100 Ha),
 - Kabupaten OKU Selatan seluas 10 Ha;
 - Kabupaten Musi Rawas seluas 40 Ha;
 - Kabupaten OKI seluas 25 Ha;
 - Kabupaten Ogan Ilir seluas 25 Ha.
4. Kegiatan Pengelolaan Sistem Perbenihan Tanaman Pangan berupa Sertifikasi Benih Padi sebanyak 1.000 Produk Sertifikat.
5. Kegiatan Sarana Pengembangan Kawasan Areal Pengendalian OPT Tanaman Pangan seluas 100 Ha.

Sedangkan untuk komoditi hortikultura yang mengalami penurunan produksi berdasarkan Tabel II.2 adalah komoditi Cabai dan Bawang Merah. Penurunan produksi komoditi ini bisa disebabkan di antaranya karena :

- ✓ adanya ketergantungan petani terhadap bantuan dari pemerintah
- ✓ kondisi iklim (curah hujan sehingga mengakibatkan pergeseran jadwal tanam)
- ✓ adanya perubahan metode pendekatan penghitungan produksi menjadi Kerangka Sampel Area (KSA)
- ✓ faktor teknis pertanian, yaitu terkait dengan serangan hama dan penyakit tanaman
- ✓ ketergantungan pada pupuk kimia, yang memperburuk kesuburan tanah
- ✓ degradasi lahan akibat penggunaan pupuk kimia dan eksploitasi berlebihan.

➤ **Capaian Kinerja Produksi Tanaman Pangan, Tanaman Hortikultura dan Tanaman Obat Tahun 2023-2024**

Tabel II.3. Realisasi Produksi Tanaman Pangan, Tanaman Hortikultura dan Tanaman Obat Tahun 2023-2024

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi (Produksi)	
			2023	2024
TANAMAN PANGAN				
1.	Padi	Ton	2.832.773,92	2.909.411,0
2.	Jagung	Ton	826.836,19	856.481,00
3.	Kedelai	Ton	48,79	865,00
TANAMAN HORTIKULTURA				
1.	Jeruk Siam	Ton	42.958,12	68.709,15
2.	Nanas	Ton	477.429,63	287.523,84
3.	Cabai	Ton	17.588,46	15.270,21
4.	Bawang Merah	Ton	1.197,02	896,50

Secara umum permasalahan utama tanaman pangan antara lain rendahnya Indeks Pertanaman (IP), kurangnya Sumber Daya Manusia (petani dan penyuluh) baik kuantitas maupun kualitas, dan terbatasnya dukungan *stakeholder* terkait lainnya (sinergisitas). Hal yang mempengaruhi capaian produksi tanaman padi adalah :

- 1) Sebagian besar Indeks Pertanaman (IP) di daerah masih rendah atau IP 100 (rata-rata IP 1,17), baru sebagian kecil daerah yang bisa mencapai IP 200 dan IP 300.
- 2) Keterbatasan alat dan mesin pertanian untuk olah tanah dan pasca panen (Traktor roda 4 dan *Combine Harvester*).
- 3) Alih fungsi lahan dari lahan tanaman pangan ke fungsi lainnya (kelapa sawit, kelapa, dan perumahan).
- 4) Masih tingginya serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT), terutama hama tikus dan hama burung pada musim tanam gadu atau IP 200.
- 5) Pengelolaan air dan tata kelola lahan yang belum optimal terutama pada lahan pasang surut dan lebak (masih banyak lahan pertanian yang tergenang pada saat curah hujan tinggi dan kekeringan/kesulitan sumber air pada saat curah hujan rendah.

Untuk tanaman jagung hal yang mempengaruhi capaian produksinya adalah :

- 1) Kurangnya kemandirian petani dalam membeli benih unggul jagung (hibrida), karena harganya relatif lebih mahal.
- 2) Masih kurangnya dukungan (sinergisitas) dari *stakeholder* terkait terutama dari pemasaran.
- 3) Curah hujan yang tinggi menyebabkan lahan pertanaman jagung banyak tergenang sehingga gagal panen.

Sedangkan untuk tanaman kedelai hal yang mempengaruhi capaian produksinya adalah kurangnya minat petani terhadap budidaya tanaman kedelai, karena dari sisi pemasaran belum mendapat dukungan jaminan pasar seperti komoditas padi dan jagung.

Tanaman hortikultura hal yang mempengaruhi capaian produksinya adalah :

- a. Luas lahan cabai dan bawang menurun karena dampak perubahan iklim (el-nino dan la-nina).
- b. Berkurangnya minat petani dalam budidaya cabai dan bawang karena modal yang besar.
- c. Masih tinggi serangan organisme pengganggu tanaman
- d. Luas Lahan komoditas buah tahunan yang beralih fungsi ke tanaman perkebunan seperti karet dan sawit

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Keberhasilan suatu perencanaan dapat dilihat dengan sinergi antara perencanaan pembangunan nasional yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat dan Perencanaan Pembangunan Daerah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi. Adapun Rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan dalam mendukung swasembada pangan dan Visi/Misi Gubernur Terpilih Sumatera Selatan, dapat dilihat pada tabel II.4 dibawah ini:

**Tabel II.4 Rumusan Startegi dan Arah Kebijakan Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura
Provinsi Sumatera Selatan**

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
MISI II : Mewujudkan Ketahanan Ekonomi Berbasis Sumber Daya Lokal dan Berkelanjutan dalam Kerangka Ekonomi Kerakyatan yang Berkeadilan untuk Meningkatkan Pendapatan Masyarakat							
Tujuan 2 (RPJMD) : Terwujudnya Daya Saing dan Ketahanan Ekonomi Daerah							
Sasaran Strategis Level 2 (RPJMD) : Meningkatnya Pengembangan Potensi Ekonomi Sektor Unggulan Daerah					Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian (Tanaman Pangan dan Hortikultura)		

	Meningkatkan Kesejahteraan Petani Tanaman Pangan dan Hortikultura				Nilai Tukar Petani Sub Sektor Tanaman Pangan dan Hortikultura		
		Meningkatnya Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura Strategis			Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Pangan		
					Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Hortikultura		
			Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Sarana Pertanian		Peningkatan Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Program Misi II : Meningkatkan produksi pertanian melalui akses sarana produksi
				Meningkatnya Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Jumlah Dokumen Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura	Kegiatan Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	
						Sub Kegiatan Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	
						Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	
						Sub Kegiatan Pengawasan Sebaran Sarana Pasca Panen Tanaman Pangan	
					Sub Kegiatan Pengawasan Sebaran Sarana Pasca Panen Hortikultura		

						Sub Kegiatan Pengawasan Sebaran Sarana Pengolahan Hasil Hortikultura	
						Sub Kegiatan Pengawasan Sebaran Sarana Pengolahan Hasil Tanaman Pangan	
				Meningkatnya Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	Jumlah Dokumen Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	Kegiatan Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	
						Sub Kegiatan Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih	
						Sub Kegiatan Perbanyak Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Batang	
						Sub Kegiatan Perbanyak Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih	
						Sub Kegiatan Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Tanaman Pangan	
						Sub Kegiatan Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Tanaman Hortikultura	
			Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Prasarana Pertanian		Cakupan Luas Lahan Pertanian yang ditetapkan menjadi LP2B	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	
				Meningkatnya Penataan Prasarana Pertanian	Jumlah Prasarana Pertanian TPH yang difasilitasi	Kegiatan Penataan Prasarana Pertanian	
						Sub Kegiatan Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	

						Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani	
						Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	
						Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya	
						Sub Kegiatan Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pasca Panen Hortikultura	
						Sub Kegiatan Penetapan Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan secara Numerik dan Spasial di Tingkat Provinsi	
						Sub Kegiatan Penyusunan Peta Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Tingkat Provinsi	
						Sub Kegiatan Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Tingkat Provinsi	

			Meningkatnya Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian		Persentase Penanganan Bencana Pertanian dan DPI Terhadap Pertanian	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	
				Meningkatnya Pelindungan Tanaman	Jumlah Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian TPH yang difasilitasi	Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi Sub Kegiatan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Sub Kegiatan Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Sub Kegiatan Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Sub Kegiatan Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	
			Meningkatnya Kapasitas SDM Bidang Penyuluh Pertanian		Persentase SDM Penyuluh Pertanian yang ditingkatkan dan Persentase Kelembagaan Koperasi Tani yang dibentuk	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	

				Meningkatnya Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian	Jumlah Ketenagaan Penyuluhan Pertanian Yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Kegiatan Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian	
						Sub Kegiatan Penguatan Kelembagaan Penyuluhan Pertanian	
						Sub Kegiatan Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh Pertanian	
				Meningkatnya Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	Jumlah Penerapan Penyuluhan Pertanian yang Difasilitasi	Kegiatan Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	
						Sub Kegiatan Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	
						Sub Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	
				Meningkatnya Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani berbasis kawasan	Jumlah Kelembagaan Ekonomi Petani Yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Lembaga)	Kegiatan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan	
						Sub Kegiatan Pendampingan dan Pengawasan Korporasi Petani	
						Sub Kegiatan Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Korporasi Petani	
						Sub Kegiatan Penilaian Kelayakan dan Standarisasi Manajemen Korporasi Petani	
						Sub Kegiatan Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani	
						Sub Kegiatan Pengawasan Sebaran Sarana Pascapanen Hortikultura	

						Sub Kegiatan Pengawasan Sebaran Sarana Pengolahan Hasil Hortikultura	
						Sub Kegiatan Pengawasan Sebaran Sarana Pengolahan Hasil Tanaman Pangan	
						Kegiatan Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	
						Sub Kegiatan Perbanyak Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Batang	Program Misi III : Melanjutkan GSMP Berbasis Pemberdayaan Masyarakat
						PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	
						Kegiatan Penataan Prasarana Pertanian	
						Sub Kegiatan Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pengolahan Hasil Hortikultura	Program Misi III : Mendorong Industrialisasi di Sektor Pertanian untuk Menghasilkan Produk Bernilai Tinggi
						Sub Kegiatan Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Hortikultura	
						Sub Kegiatan Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Tanaman Pangan	
						Sub Kegiatan Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pengolahan Hasil Tanaman Pangan	

		Meningkatnya Tata Kelola Organisasi Perangkat Daerah			Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	
			Meningkatnya Kualitas Tata kelola Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan (PEP) Perangkat Daerah		Persentase Dokumen PEP yang tersusun	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
						Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
						SubKegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	
						SubKegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	
						SubKegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	
						SubKegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	
						Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
						Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
						Sub Kegiatan Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	
						Sub Kegiatan Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang diampu dalam rangka penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	

			Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penganggaran dan Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Dokumen Penganggaran dan Keuangan yang Tersusun	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
						Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
						Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	
						Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	
						Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
						Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	
			Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kepegawaian		Persentase Pelayanan Kepegawaian yang Terlaksana	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
						Sub Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	
						Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	
						Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	
						Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
						Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	

			Meningkatnya kualitas Tata Kelola BMD Perangkat Daerah		Persentase Jenis Tata Kelola BMD Terlaksana	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah Sub Kegiatan Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	
						Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	

						Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	
						Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	
						Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
						Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
						Sub Kegiatan Pengadaan Aset Tetap Lainnya	
						Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
						Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
						Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	
						Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
						Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
						Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
						Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	

						Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
						Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
						Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
						Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	

Tujuan Strategis dari Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan bidang Penyelenggaraan Akuntabilitas adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan produktivitas tanaman pangan dengan penerapan teknologi spesifik lokasi;
2. Meningkatkan luas panen dengan penerapan teknologi spesifik lokasi;
3. Meningkatkan luas tanam tanaman hortikultura unggulan pada kawasan;
4. Meningkatkan produktivitas;
5. Meningkatkan mutu pengolahan hasil;
6. Memperluas pemasaran hasil tanaman pangan dan hortikultura.

Dengan memperhatikan visi, misi yang terdapat pada RPJMD serta mengidentifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan maka hasil telaah ditetapkan tujuan dan sasaran. Untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut terdapat beberapa indikator yang mengukurnya. Target dari indikator sasaran tersebut mengalami perubahan di Tahun 2023 dan 2024.

Rencana Strategis Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura 2025-2029 yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029 menargetkan kondisi ideal yang ingin dicapai dalam pembangunan pertanian untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga petani dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat Provinsi Sumatera Selatan secara keseluruhan dengan mengusahakan peningkatan pendapatan per kapita penduduk di sektor pertanian melalui strategi dan program-program pembangunan pertanian.

Tingkat capaian kinerja pelayanan Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura pada RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023-2024 berdasarkan persentase sasaran/target Renstra Peralihan dan realisasi terdapat beberapa indikator sasaran yang belum tercapai dan ada juga melebihi target.

Untuk mencapai Swasembada dan Swasembada Berkelanjutan Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2026 akan melaksanakan program-program sebagai berikut:

1. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian;
2. Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Pangan;
3. Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Hortikultura;
4. Program Pengelolaan Sistem Penyediaan Perbenihan Tanaman Pangan dan Hortikultura;
5. Program Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura;
6. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Pertanian;
7. Program Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, Pemasaran dan Industri Hasil Pertanian;
8. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian;
9. Program Penyuluh Pertanian.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Dengan memperhatikan tujuan dan sasaran RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029; Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai kewenangan daerah; serta mengidentifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan maka ditetapkan tujuan rencana kerja ini adalah untuk mencapai tujuan pembangunan daerah secara lebih efektif dan efisien, serta mempertajam target kinerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura agar sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam rangka untuk mendukung pencapaian Visi Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan 2025-2029.

Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan merupakan salah satu Pelayanan di bidang Pembangunan Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura di Sumatera Selatan perlu didasarkan pada peningkatan keterampilan dan keahlian petani, pengembangan sistem data dasar dan informasi yang akurat dan lengkap, penyediaan prasarana dan sarana produksi, peningkatan kerjasama dan kemitraan dengan swasta, penguatan koordinasi dan konsultasi dengan para pemangku kepentingan, serta pelaksanaan pengendalian dan evaluasi yang teratur dan terpadu.

Potensi besar khususnya di sektor pertanian tanaman pangan dan hortikultura, serta penetapan program prioritas pusat yang menjadi tantangan terdapat beberapa permasalahan dalam mempertahankan perannya sebagai lumbung pangan, antara lain :

✓ **Rendahnya Indeks Pertanaman Tanaman Padi**

Indeks Pertanaman Tanaman Padi di Provinsi Sumatera Selatan dalam kurun waktu 2021-2024.

Tabel II.5. Indeks Pertanaman Padi Tahun 2021-2024

NO.	KABUPATEN/ KOTA	Indeks Pertanaman (IP)			
		2021	2022	2023	2024
1	Muara Enim	0.89	0.92	0.87	0.95
2	Musi Rawas	1.61	1.42	1.48	1.57
3	Empat Lawang	1.21	0.98	1.17	1.02
4	Pagar Alam	0.97	1.06	1.28	1.31
5	Lubuk Linggau	1.65	1.19	1.23	1.55
6	OKU Timur	1.69	1.91	1.89	1.97
7	OKU	0.75	0.82	0.81	0.74
8	Muratara	1.36	1.37	1.25	1.24
9	Banyuasin	1.12	1.07	1.07	1.12
10	OKU Selatan	1.13	1.03	1.16	1.12
11	Musi Banyuasin	0.96	0.90	0.81	0.76
12	Ogan Ilir	0.63	0.72	0.74	0.70
13	Prabumulih	0.14	0.14	0.13	0.18
14	OKI	0.92	1.06	0.97	1.06
15	Palembang	0.76	0.73	0.96	0.82
16	Pali	1.11	1.52	1.65	1.75
17	Lahat	1.15	1.21	1.13	1.05
Jumlah		1.11	1.15	1.13	1.17

Jika dilihat pada Tabel II.5, Indeks Pertanaman Tanaman Padi di Provinsi Sumatera Selatan masih rendah antara 1,11-1,17 kurun waktu 2021-2024. Hal ini menunjukkan bahwa dalam satu tahun, satu hektar lahan padi hanya dapat ditanami sebanyak 1,11 atau 1,17 kali atau 1 kali ditambah 11% atau 17% lagi dari satu kali penanaman penuh. Hal ini menjadi tantangan bagi pertanian di Provinsi Sumatera Selatan untuk memberikan solusi supaya petani dapat meningkatkan indeks pertanaman padi mereka, yang salah satunya sedang dilaksanakan di Tahun 2024 dan 2025 yaitu melalui Optimalisasi Lahan.

✓ **Konversi Lahan Pertanian ke Non Pertanian**

Lahan pertanian semakin berkurang akibat konversi untuk industri, perkebunan, dan permukiman.

**Tabel II.6. Luas Baku Sawah, LP2B dan IP Tahun 2024
Provinsi Sumatera Selatan**

NO.	KABUPATEN/ KOTA	LBS (Ha)	LP2B (Ha)*	Selisih LBS dan LP2B (Ha)
1	Muara Enim	19,527	16,512.54	3,014.46
2	Musi Rawas	14,969	21,635.92	(6,666.92)
3	Empat Lawang	9,432	11,562.00	(2,130.00)
4	Pagar Alam	3,088	1,392.66	1,695.34
5	Lubuk Linggau	1,129	857.19	271.81
6	OKU Timur	66,624	52,285.84	14,338.16
7	OKU	3,561	-	-
8	Muratara	2,201	3,296.29	(1,095.29)
9	Banyuasin	189,345	104,973.00	84,372.00
10	OKU Selatan	8,821	6,521.00	2,300.00
11	Musi Banyuasin	38,051	33,809.66	4,241.34
12	Ogan Ilir	34,787	30,934.55	3,852.45
13	Prabumulih	165	94.71	70.29
14	OKI	105,436	75,424.28	30,011.72
15	Palembang	3,295	1,014.17	2,280.83
16	Pali	6,399	3,619.00	2,780.00
17	Lahat	12,652	12,000.00	652.00
Jumlah		519,482.00	375,932.81	143,549.20

*) Data per tanggal 06 Oktober 2023

✓ **Lahan Sawah Belum Termanfaatkan Secara Optimal**

Terlantarnya lahan sawah karena pengairan tidak berfungsi dengan baik.

Tabel II.7. Luas Baku Sawah, IP Tahun 2024 Provinsi Sumatera Selatan

NO.	KABUPATEN/ KOTA	LBS (Ha)	IP (2024)
1	Muara Enim	19,527	0.95
2	Musi Rawas	14,969	1.57
3	Empat Lawang	9,432	1.02
4	Pagar Alam	3,088	1.31
5	Lubuk Linggau	1,129	1.55
6	OKU Timur	66,624	1.97
7	OKU	3,561	0.74
8	Muratara	2,201	1.24
9	Banyuasin	189,345	1.12
10	OKU Selatan	8,821	1.12
11	Musi Banyuasin	38,051	0.76
12	Ogan Ilir	34,787	0.70
13	Prabumulih	165	0.18
14	OKI	105,436	1.06
15	Palembang	3,295	0.82
16	Pali	6,399	1.75
17	Lahat	12,652	1.05
Jumlah		519,482.00	1.17

Dari tabel di atas mengindikasikan bahwa lahan sawah di Provinsi Sumatera Selatan sebesar 519.482 ha baru bisa ditanami 1,17 kali per hektar di tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa lahan sawah banyak tidak termanfaatkan secara optimal.

- ✓ **Pemenuhan Kebutuhan Sendiri Benih Tanaman Pangan di Provinsi Sumatera Selatan masih rendah**

Tabel II.8. Bantuan Benih dan Saprodi Pengembangan Padi Tahun 2021-2025

No	Sumber Bantuan	Tahun (Ha)				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	APBN	40,575	30,641	145,169	218,200	158,323
2	APBD	-	3,000	10,000	2,500	15,000
	TOTAL	40,575	33,641	155,169	220,700	173,323

Dari tabel di atas, masih terbatasnya pemenuhan kebutuhan benih di Provinsi Sumatera Selatan. Sedangkan untuk pemenuhan produksi padi 4 (empat) juta ton di Tahun 2026 akan dicapai dengan strategi intervensi bantuan benih untuk pertanaman seluas 200.000 Ha

melalui sumber pembiayaan APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota.

✓ **Serangan Hama dan Penyakit**

Serangan OPT menjadi salah satu permasalahan di dalam peningkatan produksi pertanian. Sebagaimana terlihat pada tabel di bawah ini.

Tabel II.9. Luas Serangan OPT Tanaman Pangan dan Hortikultura Tahun 2020-2024

No	Uraian	Satuan	Realisasi				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Luas Serangan OPT Hortikultura	Ha	822.80	339.56	397.35	386.06	643.24
2	Jumlah Luas Serangan OPT Tanaman Pangan	Ha	24,945.72	17,867.19	17,543.24	13,133.44	17,081.28

Tabel di atas menunjukkan bahwa di tahun 2024 terjadi peningkatan serangan OPT baik di komoditi tanaman pangan maupun hortikultura. Untuk itu, di program 5 (lima) tahun ke depan penanganan terhadap serangan OPT menjadi salah satu prioritas pertanian di Provinsi Sumatera Selatan.

✓ **Ketergantungan pada Cuaca dan Iklim**

Tabel II.10. Karakteristik Luas Baku Sawah Provinsi Sumatera Selatan

No.	Luas Baku Sawah ATR/BPN 2019 SUMSEL (Ha)		%
	Typologi Lahan	Luas (Ha)	
1	Irigasi	75.798	16,11
2	Tadah Hujan	52.912	11,24
3	Pasang Surut	214.454	45,57
4	Lebak	127.438	27,08
Jumlah		470.602	100,00

Jika dilihat pada tipologi lahan baku sawah di Provinsi Sumatera Selatan, hampir 70% merupakan lahan sawah pasang surut dan rawa lebak. Hal ini menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi produksi pertanian khususnya padi di wilayah Sumatera Selatan karena penanaman padi tergantung dari air yang menggenangi lahan sawah.

Tabel II.11. Luas Area Terdampak Perubahan Iklim Tahun 2020-2024

No	Uraian	Satuan	Realisasi				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Luas area terdampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan	Ha	12,920.05	3,437.50	6,271.75	2,958.02	7,753.00

Selain itu, cuaca dan iklim juga sangat mempengaruhi kondisi sawah, jika curah hujan tinggi maka akan terjadi kemunduran jadwal tanam begitu juga jika terjadi kekeringan. Sebagaimana tabel di atas yang menunjukkan terjadi peningkatan luas serangan area yang terdampak iklim. Hal ini tetap menjadi perhatian bagi Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dalam memberikan solusi terhadap permasalahan ini.

✓ **Fluktuasi Harga dan Tengkulak**

Harga hasil pertanian yang tidak stabil dan petani sering bergantung pada tengkulak. Di Tahun 2025 telah dibentuk Tim yang terdiri dari beberapa OPD Provinsi Sumatera Selatan untuk menjaga harga pembelian pemerintah (HPP) gabah yang ditetapkan sebesar Rp. 6.500 per kilogram. Hal ini bertujuan untuk melindungi petani dan memastikan stabilitas pasokan beras. Permasalahan ini akan menjadi perhatian untuk ke depannya dan tim yang sudah dibentuk dapat melaksanakan tugas sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

✓ **Ketimpangan Akses Petani Kecil terhadap Program**

Petani kecil yang tidak terdaftar di dalam aplikasi Simultan yang menjadi dasar dalam pemberian bantuan pemerintah.

Selain permasalahan yang terjadi dalam upaya intensifikasi dan ekstensifikasi, permasalahan di Sumber Daya Manusia (SDM) Pertanian juga menjadi faktor penting dalam upaya peningkatan produksi dan produktivitas pertanian. SDM Pertanian dalam hal ini petani, kelompok tani dan petugas/ lembaga pertanian (PPL, POPT dan PBT). Permasalahan dari sisi petani/ kelompok tani berupa kurangnya kemampuan petani/ kelompok tani dalam menerapkan teknologi budidaya dan pasca panen. Sedangkan permasalahan dari sisi petugas/ lembaga pertanian berupa rendahnya kapasitas kelembagaan dan ketenagaan penyuluhan pertanian terkait dengan belum seluruh kelembagaan penyuluhan (BPP) diklasifikasikan.

Perumusan isu strategis dalam KLHS RPJPD Provinsi Sumatera Selatan dilakukan dengan mengelompokkan isu dan disintesa menyesuaikan dengan kondisional secara faktual terhadap apa yang terjadi di Sumatera Selatan. Isu strategis didapatkan dengan menggunakan metode *cross-cutting* antara Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dengan kinerja capaian TPB; Isu Strategis RPJPD 2025- 2045; Isu strategis RPD 2024-2026; Isu KLHS RTRW Provinsi Sumatera dan Isu Masukan Pokja dan Peserta Konsultasi Publik. Berdasarkan Hasil *cross-cutting* tersebut didapatkan ranking setiap pasangan *cross-cutting*. Selanjutnya adalah proses penjumlahan ranking *cross-cutting* sehingga didapatkan Hasil TPB prioritas (Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan, 2024).

Selain itu beberapa yang menjadi isu global, nasional dan regional menjadi hal-hal yang diperhatikan dalam penyusunan rencana strategis untuk 5 (lima) tahun ke depan. Isu global saat ini berupa Krisis Pangan Global Saat Iklim Ekstrim; kemudian Isu Nasional berupa Alih Fungsi Lahan Pertanian, Perubahan Iklim Ekstrim, Petani didominasi Umur Tua, Kualitas SDM masih rendah, dan Jumlah Penyuluh Terbatas, serta Isu Regional berupa Produktivitas Pertanian dan Hilirisasi Komoditi Unggulan belum

optimal, Mitigasi Bencana Kebakaran Hutan Lahan, Banjir dan Tanah Longsor belum optimal, serta Kemiskinan yang masih tinggi. Isu-isu tersebut dapat ditarik menjadi isu-isu yang akan diterjemahkan ke dalam Tabel di bawah :

Tabel II.12 Rencana Strategis Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Potensi Lahan Rawa Mineral Sumsel terluas se Indonesia (2,1 juta ha yang terdiri dari 0,885 juta ha rawa pasang surut dan 1,246 juta ha rawa lebak)	1. Rendahnya Indeks Pertanaman Tanaman Padi 2. Konversi Lahan Pertanian ke Non Pertanian 3. Lahan Sawah belum termanfaatkan secara optimal 4. Serangan Hama dan Penyakit 5. Ketergantungan pada Curah Hujan 6. Dampak Perubahan Iklim 7. Fluktuasi Harga dan Tengkulak 8. Kurangnya Regenerasi Petani Muda 9. Ketimpangan akses petani kecil terhadap program pemerintah. 10. Rendahnya Penggunaan Teknologi oleh Petani	1. Akselerasi pengentasan kemiskinan ekstrem dan stunting Alih Fungsi Lahan dan Gambut 2. Kerentanan Ketahanan Pangan 3. Alih Fungsi Lahan dan Gambut 4. Belum optimalnya upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim	Krisis Pangan Global Saat Iklim Ekstrem	1. Alih Fungsi Lahan Pertanian 2. Perubahan Iklim Ekstrem 3. Petani Didominasi Umur Tua 4. Kualitas SDM Masih Rendah 5. Jumlah Penyuluh Terbatas	1. Produktivitas Pertanian dan Hilirisasi Komoditi Unggulan Belum Optimal 2. Mitigasi Bencana Kebakaran Hutan lahan, Banjir dan Tanah Longsor Belum Optimal 3. Kemiskinan yang masih tinggi	1. Kerentanan Ketahanan Pangan (Stabilitas Produksi Komoditi Tanaman Pangan dan Hortikultura serta Hilirisasi Pertanian TPH) 2. Belum Optimalnya Mitigasi Serangan OPT dan Dampak Perubahan Iklim (DPI) 3. Alih Fungsi Lahan Pertanian 4. Rendahnya kapasitas penyuluhan pertanian 5. Pemenuhan 1 Desa 1 Penyuluh (Keberadaan PPEP di Provinsi Sumsel)

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Rencana Kerja bisa berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan apabila ditunjang dengan produk dokumen perencanaan yang baik, dalam rangka mengawal program/kegiatan pembangunan yang dilaksanakan agar dapat berjalan secara efektif, efisien, dan tepat sasaran. Dokumen perencanaan daerah diantaranya terdiri dari: Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis SKPD, Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), Rencana Kerja SKPD dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

Dokumen perencanaan sebagaimana disebutkan di atas khususnya Rencana Kerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024. Adapun rincian review terhadap rancangan awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2024 dengan Rencana Kerja Dinas Pertanian Tahun 2023 disajikan pada Tabel T-C. 31 sebagai berikut :

Tabel T-C.31
Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025
Provinsi Sumatera Selatan

Nomor	Kode	Permendagri 90 Tahun 2019 (Kepmendagri 050-3708)	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025					
		Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)		Bertambah / (Berkurang)	Sumber Dana
						Semula	Menjadi		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah (%)		100	55.126.248.000	55.126.248.000	-	
	3.27.01.1.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan Kinerja Tahunan (dok)		1	1.020.000.000	1.020.000.000		
	3.27.01.1.01.01	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah (dok)	Palembang	4	470.000.000	470.000.000		PAD
	3.27.01.1.01.07	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah (laporan)	17 kab/kota	3	550.000.000	550.000.000		PAD
	3.27.01.1.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)		100	44.207.408.000	44.207.408.000		
	3.27.01.1.02.01	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN (org)	Palembang	418	41.034.468.000	41.034.468.000		DAU
	3.27.01.1.02.02	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN (dokumen)	Palembang 4 UPTD	5	3.172.940.000	3.172.940.000		PAD
	3.27.01.1.03	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Persentase Layanan Kelancaran Administrasi Perkantoran (%)		100	175.000.000	175.000.000		
	3.27.01.1.03.02	Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah SKPD (dok)	Palembang	1	75.000.000	75.000.000		PAD
	3.27.01.1.03.04	Sub Kegiatan Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan hasil pembinaan, pengawasan dan pengendalian barang milik daerah (laporan)	17 kab/kota	1	100.000.000	100.000.000		PAD

	3.27.01.1.05	Kegiatan administrasi kepegawaian perangkat daerah				146.200.000	146.200.000		
			Persentase Ketaatan terhadap aturan kepegawaian (%)		100		-		
			Persentase pegawai yang ditingkatkan kapasitasnya (%)		100		-		
	3.27.01.1.05.09	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan tugas dan fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan (orang)	Palembang	10	146.200.000	146.200.000		PAD
	3.27.01.1.06	Kegiatan administrasi umum perangkat daerah	Persentase Layanan Kelancaran Administrasi Perkantoran (%)		100	4.877.640.000	4.877.640.000	13.200.000	
	3.27.01.1.06.01	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan (paket)	Palembang 4 UPTD	1	50.000.000	50.000.000	13.200.000	
	3.27.01.1.06.02	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan (paket)	Palembang	2	1.702.200.000	1.702.200.000	-	PAD
	3.27.01.1.06.04	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan (paket)	Palembang	2	230.000.000	230.000.000		PAD
	3.27.01.1.06.05	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan (paket)	Palembang	1	50.000.000	50.000.000		PAD
	3.27.01.1.06.06	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan (dokumen)	Palembang	1	55.000.000	55.000.000		PAD
	3.27.01.1.06.09	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi (laporan)	17 kab/kota	2	1.290.440.000	1.290.440.000		PAD
	3.27.01.1.06.11	Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SIPD	Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD (dokumen)	Palembang	1	1.500.000.000	1.500.000.000		PAD
	3.27.01.1.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Layanan Kelancaran Administrasi Perkantoran (%)		100	1.675.000.000	1.675.000.000		
	3.27.01.1.08.01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat (laporan)	Palembang	1	5.000.000	5.000.000		PAD
	3.27.01.1.08.02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, SDA, dan listrik yang disediakan (laporan)	Palembang 4 UPTD	1	1.670.000.000	1.670.000.000		PAD

	3.27.01.1.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Layanan Kelancaran Administrasi Perkantoran (%)		100	3.025.000.000	3.025.000.000		
	3.27.01.1.09.02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya (unit)	Palembang 4 UPTD	253	900.000.000	900.000.000		PAD
	3.27.01.1.09.06	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara (unit)	Palembang 4 UPTD	135	160.000.000	160.000.000		PAD
	3.27.01.1.09.09	Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi (unit)	Palembang 4 UPTD	2	1.965.000.000	1.965.000.000		PAD
	3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Luas Pengembangan Tanaman Pangan dan Hortikultura :	17 kab/kota		35.139.500.000	35.139.500.000		
			- Padi (Ha)		10.000		-		
			- Jagung (Ha)		2.000		-		
			- Cabe (Ha)		6		-		
			- Bawang Merah (Ha)		6		-		
			- Jeruk (Ha)		15		-		
			- Nanas (Ha)		5		-		
	3.27.02.1.01	Kegiatan Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Jumlah Pengawasan Peredaran Sarana TPH yang difasilitasi (dok)	17 kab/kota	5	27.394.400.400	27.394.400.400		
	3.27.02.1.01.01	Sub Kegiatan Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan dan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah pengawasan ketersediaan dan sebaran pupuk, pestisida, alsintan dan sarana pendukung pertanian (laporan)	17 kab/kota	4	27.194.400.400	27.194.400.400		PAD
	3.27.02.1.01.04	Sub Kegiatan Pengawasan Sebaran Sarana Pasca Panen Tanaman Pangan	Jumlah pengawasan ketersediaan dan sebaran sarana pasca panen tanaman pangan (Laporan)	17 kab/kota	1		-		PAD
	3.27.02.1.01.08	Sub Kegiatan Pengawasan Sebaran Sarana Pengolahan Hasil Tanaman Pangan	Jumlah pengawasan ketersediaan dan sebaran sarana pengolahan hasil tanaman pangan (Laporan)	17 kab/kota	1	200.000.000	200.000.000		PAD
	3.27.02.1.02	Kegiatan Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	Jumlah Pengawasan Mutu, Penyediaan dan peredaran benih TPH yang difasilitasi (dok)		1	7.745.099.600	7.745.099.600		

	3.27.02.1.02.01	Sub Kegiatan Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih	Jumlah sertifikat benih (sertifikat)	17 kab/kota	22	4.500.000.000	4.500.000.000		PAD
	3.27.02.1.02.05	Sub Kegiatan Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan	Jumlah benih unggul bersertifikat tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan yang terawasi, tersedia dan beredar yang memenuhi standar mutu yang ditetapkan sesuai sasaran 6 tepat, yaitu tepat jenis/ varietas, mutu, jumlah, waktu, tempat dan harga (laporan)	17 kab/kota	4	3.245.099.600	3.245.099.600		PAD
	3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Peningkatan Luas Lahan Siap Tanam :			3.790.358.000	3.790.358.000		
			- Padi (Ha)		3		-		
	3.27.03.1.01	Kegiatan Penataan Prasarana Pertanian	Jumlah Prasarana Pertanian TPH yang difasilitasi (unit)		4	3.790.358.000	3.790.358.000		
	3.27.03.1.01.04	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani	Jumlah koordinasi, sinkronisasi dan pengelolaan jaringan irigasi di tingkat usaha tani (dok)	BA	2	1.371.800.000	1.371.800.000		PAD
		Pendampingan Cetak Sawah Rakyat / Optimasi Lahan				371.800.000	371.800.000		
		Gebyar Perbenihan Tanaman Pangan X Sumatera Selatan				1.000.000.000	1.000.000.000		
	3.27.03.1.01.10	Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya	Jumlah gedung UPTD Pertanian serta sarana pendukungnya yang dibangun, dipelihara dan direhabilitasi (unit)	3 UPTD lingkup Dinas Pertanian TPH	2	2.418.558.000	2.418.558.000		PAD
	3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Luas Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi :			830.000.000	830.000.000		
			- Tanaman Pangan (Ha)	17 kab/kota	1.015		-		
			- Hortikultura (Ha)	17 kab/kota	70		-		
	3.27.05.1.01	Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	Jumlah Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian TPH yang difasilitasi (kali)	17 kab/kota	215	830.000.000	830.000.000		

	3.27.05.1.01.01	Sub Kegiatan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Jumlah luas serangan OPT tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan yang dikendalikan (ha)	17 kab/kota	1.085	630.000.000	630.000.000		PAD
	3.27.05.1.01.02	Sub Kegiatan Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani (ha)	17 kab/kota	330	200.000.000	200.000.000		PAD
	3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN				36.016.229.825	36.016.229.825		
			Jumlah kelembagaan penyuluh yang meningkat kapasitasnya (unit)	17 kab/kota	34		-		
			Jumlah Kelembagaan petani yang meningkat kapasitasnya (unit)	17 kab/kota	7		-		
			Jumlah kemitraan usaha tani (unit)	17 kab/kota	1		-		
	3.27.07.1.01	Kegiatan Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian	Jumlah ketenagaan penyuluhan pertanian yang ditingkatkan kapasitasnya (orang)		60	850.000.000	850.000.000		
	3.27.07.1.01.04	Sub Kegiatan Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh Pertanian	Jumlah Penyuluh yang tersedia dan ditingkatkan kapasitasnya (org)	Balai Pelatihan Penyuluhan Pertanian (OKU Timur) dan Palembang	60	850.000.000	850.000.000		PAD
	3.27.07.1.02	Kegiatan Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	Jumlah penerapan penyuluhan pertanian yang difasilitasi (dok)		2	34.331.229.825	34.331.229.825		
	3.27.07.1.02.01	Sub Kegiatan Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	Jumlah Diseminasi informasi teknis, sosial, ekonomi dan inovasi pertanian (dokumen)	BP3 Martapura (OKU Timur)	1	250.000.000	250.000.000		PAD
	3.27.07.1.02.02	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	Jumlah kelompok petani yang mendapat penyuluhan dan pemberdayaan (kelompok)	17 kab/kota	1,3	34.081.229.825	34.081.229.825		PAD
	3.27.07.1.03	Kegiatan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan	Jumlah kelembagaan ekonomi petani yang ditingkatkan kapasitasnya (lembaga)		8	835.000.000	835.000.000		

	3.27.07.1.03.05	Sub Kegiatan Pendampingan dan Pengawasan Korporasi Petani	Jumlah korporasi petani yang didampingi (unit)	Muba, Mura, OI, OKI, ME, OKUT, Banyuasin	7	735.000.000	735.000.000		PAD
	3.27.07.1.03.06	Sub Kegiatan Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Korporasi Petani	Jumlah korporasi petani yang dibentuk dan beroperasi (unit)	17 kab/kota	1	100.000.000	100.000.000		PAD
	TOTAL					130.902.335.825	130.902.335.825		

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam konteks perencanaan pembangunan, Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan dituntut untuk mampu menggali dan memanfaatkan potensi yang ada, memecahkan berbagai permasalahan dan tantangan, melayani/memenuhi kebutuhan masyarakat. Disisi lain, dalam era globalisasi, Dinas Pertanian dituntut untuk siap dan sanggup membuat/menyusun suatu perencanaan yang baik, sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.

Proses penyusunan Renja Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Tahun 2024 didasarkan kepada Renstra Perubahan Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024-2026 dengan tetap memperhatikan program prioritas yang telah dituangkan di dalam Dokumen Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Ranwal RKPD) Tahun 2023, agar didalam pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan dalam RPJMD dan Renstra dapat disinkronkan.

Usulan Program dan kegiatan dari masyarakat dilaksanakan melalui identifikasi program dan kegiatan di 17 kabupaten/kota yang selanjutnya dibahas pada rapat teknis ditingkat provinsi yang dihadiri oleh Dinas Pertanian lingkup tanaman pangan dan BAPPEDA Kabupaten/Kota serta aspirasi masyarakat yang disampaikan melaui Anggota Dewan pada saat reses. Usulan masyarakat tersebut setelah dibahas pada rapat teknis dan pada Musrenbang Tingkat Provinsi dan Musrenbangnas maka bentuk kegiatan yang dilaksanakan berupa bantuan benih, pupuk dan pestisida, pengadaan sarana prasarana alat dan mesin pertanian.

Usulan masyarakat tersebut sebagian besar terkait dengan isu-isu penting penyelenggaraan Tupoksi Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan yaitu yang berkaitan dengan pencapaian swasembada dan swasembada berkelanjutan komoditas strategis (padi, jagung

dan kedelai), serta komoditas pangan lainnya berupa tanaman buah-buahan dan sayur-sayuran. Usulan masyarakat yang terkait Tupoksi Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan secara program, kegiatan dan komponen kegiatan terdapat kesesuaian dengan Program dan Kegiatan Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan baik bersumber dari pendanaan APBD maupun APBN.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional Terkait Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan

Presiden Prabowo Subianto menyatakan komitmen Indonesia menuju swasembada pangan dan energi sebagai langkah utama guna menghadapi tantangan global yang makin kompleks. Komitmen tersebut disampaikan pada pidato pertamanya usai Pengucapan Sumpah sebagai Presiden Republik Indonesia di Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD, di Jakarta, pada Minggu, 20 Oktober 2024. Beliau juga menyampaikan bahwa dalam situasi krisis global, negara-negara lain akan mengutamakan kepentingan domestiknya. Untuk itu, Indonesia harus mampu memproduksi dan memenuhi kebutuhan pangan nasional secara mandiri. Selain ketahanan pangan, Presiden Prabowo juga menekankan pentingnya mencapai swasembada energi. Ia mengingatkan bahwa ketergantungan pada sumber energi luar negeri menjadi ancaman serius di tengah ketegangan geopolitik global (BPMI Setpres).

Presiden dan Wakil Presiden terpilih, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka mengusung **Visi “Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045”**. Visi ini menjadi arah besar pembangunan nasional yang memandu kebijakan dan perencanaan ke depan, termasuk dalam RPJMN 2025–2029 sebagai implementasi tahap awal menuju Indonesia Emas 2045.

Untuk mendukung pencapaian visi di atas, pemerintah merumuskan delapan misi strategis yang dikenal dengan sebutan **"Asta Cita"**, yaitu:

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).

2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan Makmur

Pada **Asta Cita kedua**, yaitu memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru. Untuk program pangan di antaranya dengan pengembangan program *food estate*, terutama untuk padi, jagung, singkong, dan kedelai, dan tebu. Ditargetkan minimal 4 juta ha tambahan luas panen tanaman pangan tercapai pada tahun 2029. Guna mencapai swasembada pangan, dibutuhkan peningkatan produktivitas lahan pertanian melalui berbagai program intensifikasi dan ekstensifikasi lahan.

Kedua program tersebut dilakukan di level desa, kecamatan, kabupaten/kota, dan nasional secara lebih efektif, terintegrasi, dan berkelanjutan dengan komoditas padi, jagung, kedelai, singkong, tebu, sagu, dan sukun. Ditargetkan minimal tambahan 4 juta ha luas panen tanaman pangan tercapai pada tahun 2029.

Swasembada pangan ditentukan oleh tercapainya produksi dan produktivitas yang berkelanjutan dari komoditas pangan. Produksi dan produktivitas pangan akan sangat ditentukan oleh tersedianya dan akses yang menyeluruh petani pada pupuk, benih unggul, dan pestisida. Untuk itu, pemerintah berkewajiban untuk menjamin ketersediaan termasuk akses langsung pupuk, benih, dan pestisida kepada petani.

Dalam mencapai Percepatan Swasembada Pangan Berkelanjutan, Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2026 akan mendukung Program Prioritas Kementerian Pertanian, yaitu diantaranya fokus untuk peningkatan produksi padi, jagung, dan komoditas strategis lainnya, kemudian optimasi lahan, cetak sawah, penyiapan benih unggul dan hilirisasi komoditas pertanian.

Sedangkan Target dan langkah strategis Kementerian Pertanian (Kementan) untuk tahun 2026 adalah:

- Meningkatkan produksi beras, jagung, kedelai, aneka cabai, bawang merah, kopi, kakao, tebu, kelapa, daging sapi/kerbau, dan daging ayam;
- Memperkuat cetak sawah, optimalisasi lahan, dan dukungan sarana-prasarana produksi;
- Meningkatkan produksi susu dan daging sapi;
- Menyiapkan benih unggul;
- Menyediakan alat dan mesin pertanian (alsintan) prapanen;
- Menyediakan pupuk bersubsidi;

- Mengembangkan pertanian moden melalui pertanian milenial.

Dari beberapa potensi, permasalahan dan isu strategis yang tercantum dalam dokumen KLHS RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029, serta isu global, nasional dan regional, maka dapat dirumuskan isu-isu strategis di Dinas Pertanian TPH Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana tabel di bawah ini.

III.1 Isu-Isu Strategis dan Permasalahan PD di Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Potensi Lahan Rawa Mineral Sumsel terluas se Indonesia (2,1 juta ha yang terdiri dari 0,885 juta ha rawa pasang surut dan 1,246 juta ha rawa lebak)	1. Rendahnya Indeks Pertanaman Tanaman Padi 2. Konversi Lahan Pertanian ke Non Pertanian 3. Lahan Sawah belum termanfaatkan secara optimal 4. Serangan Hama dan Penyakit 5. Ketergantungan pada Curah Hujan 6. Dampak Perubahan Iklim 7. Fluktuasi Harga dan Tengkulak 8. Kurangnya Regenerasi Petani Muda 9. Ketimpangan akses petani kecil terhadap program pemerintah. 10. Rendahnya Penggunaan Teknologi oleh Petani	1. Akselerasi pengentasan kemiskinan ekstrem dan stunting Alih Fungsi Lahan dan Gambut 2. Kerentanan Ketahanan Pangan 3. Alih Fungsi Lahan dan Gambut 4. Belum optimalnya upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim	Krisis Pangan Global Saat Iklim Ekstrem	1. Alih Fungsi Lahan Pertanian 2. Perubahan Iklim Ekstrem 3. Petani Didominasi Umur Tua 4. Kualitas SDM Masih Rendah 5. Jumlah Penyuluh Terbatas	1. Produktivitas Pertanian dan Hilirisasi Komoditi Unggulan Belum Optimal 2. Mitigasi Bencana Kebakaran Hutan lahan, Banjir dan Tanah Longsor Belum Optimal 3. Kemiskinan yang masih tinggi	1. Kerentanan Ketahanan Pangan (Stabilitas Produksi Komoditi Tanaman Pangan dan Hortikultura serta Hilirisasi Pertanian TPH) 2. Belum Optimalnya Mitigasi Serangan OPT dan Dampak Perubahan Iklim (DPI) 3. Alih Fungsi Lahan Pertanian 4. Rendahnya kapasitas penyuluhan pertanian 5. Pemenuhan 1 Desa 1 Penyuluh (Keberadaan PPEP di Provinsi Sumsel)

Adapun strategi/ rencana tindakan yang akan dilakukan dalam mencapai tujuan dan sasaran, meliputi :

1. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura, berupa Penyediaan Benih Padi, Jagung, Cabe, Bawang Merah dan saprodi; Pemeliharaan Tanaman Buah-Buahan; dan Penyediaan Alat-Alat Mesin Pertanian sesuai dengan usulan kabupaten/kota.
2. Gerakan Sumsel Mandiri Pangan (GSMP), dengan melakukan gerakan berupa sosialisasi/ pembinaan/ penyediaan benih/ bibit tanaman khususnya tanaman hortikultura kepada rumah tangga/ masyarakat (di lokasi-lokasi terdampak inflasi).
3. Dukungan Pendampingan Pengembangan Infrastruktur Irigasi (Optimasi Lahan) sehingga dapat berdampak bagi peningkatan produksi dan produktivitas komoditi tanaman pangan.
4. Dukungan Pendampingan Perluasan Lahan Sawah sebagaimana ditargetkan sehingga dapat berdampak bagi ketahanan pangan.
5. Identifikasi Jumlah/ Varietas/ Kebutuhan Tanaman Sayuran khususnya komoditi penyumbang inflasi (cabe besar dan bawang merah) di 4 (empat) kota/ kabupaten (Kota Palembang, Kota Lubuk Linggau, Kabupaten OKI, dan Kabupaten Muara Enim).
6. Identifikasi Jumlah/ Varietas/ Kebutuhan Tanaman Buah-Buahan Unggulan khususnya buah durian dan duku agar terjaga keberadaan dan kelestariannya di kawasan sentra produksi.
7. *Food Estate/* KSPP Berbasis Korporasi melalui peningkatan kapasitas korporasi/ penyediaan bantuan sarana prasarana pasca panen (Dryer/ RMU/ Combine/ Power Thresher),

serta akses pembiayaan dan pemasaran usaha ekonomis petani.

8. Penguatan Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian, berupa Membatasi alih fungsi lahan untuk memastikan keberlanjutan produksi pangan dengan program LP2B.
9. Pemenuhan 1 desa 1 penyuluh (Laki-Laki maupun Perempuan) sesuai dengan kebijakan dan aturan pemerintah.
10. Adaptasi terhadap Perubahan Iklim, berupa Meningkatkan penggunaan varietas padi tahan cuaca ekstrem dan memperkuat sistem peringatan dini bencana.
11. Pemberdayaan dan Pelatihan Petani dan Penyuluh (baik Penyuluh laki-laki maupun Penyuluh Perempuan), berupa pemberian edukasi kepada petani termasuk wanita tani tentang teknik pertanian berkelanjutan (presisi).

3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi. Tujuan disini adalah suatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan pada jangka waktu 5 (lima) tahun seperti yang telah dirumuskan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) tahun 2025-2029. Arah kebijakan Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan dalam mencapai tujuan dan sasaran Rencana Strategis Tahun 2025-2029, yaitu pada Tabel dibawah ini :

III.2 Arah kebijakan Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025-2029

OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD
1. Permentan Nomor 03 Tahun 2024 tentang Pengembangan Kawasan Pertanian 2. Permentan Nomor 15 Tahun 2025 tentang Tata Cara Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi 3. Kepmentan RI Nomor 02/Kpts/RC.040/M/01/2025 tentang Kawasan Pertanian Nasional 4. Pasal 46 Ayat 4 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Penyediaan Penyuluh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit 1 (satu) orang Penyuluh dalam 1 (satu) desa	Optimalisasi Peningkatan Kesejahteraan Petani melalui Strategi Meningkatkan Produksi Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan, serta Meningkatkan Akses Permodalan dan Sarana Pertanian	1. Stabilitas Produksi TPH melalui : Peningkatan Produksi TPH dengan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pertanian TPH; Gerakan Sumsel Mandiri Pangan (GSMP); Pengembangan Infrastruktur Irigasi (Optimasi Lahan) dan Perluasan Lahan Sawah; Identifikasi Jumlah dan Varietas Sayur dan Buah Unggulan/Strategis Sumsel) 2. Pengembangan Food Estate/ KSPP Berbasis Korporasi 3. Pemenuhan Ketentuan 1 Desa 1 Penyuluh (Penyuluh Laki-Laki dan Perempuan) 4. Penguatan Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian 5. Adaptasi terhadap Perubahan Iklim 6. Pemberdayaan dan Pelatihan Petani termasuk wanita tani dalam berusaha tani.

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan secara nyata oleh Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan pada 5 (lima) tahun mendatang.

Sasaran Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan memberikan fokus pada penyusunan kegiatan, sehingga bersifat spesifik, terinci dapat diukur dan dapat dicapai. Sasaran tersebut merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dalam proses perencanaan strategis. Fokus utama penentuan sasaran, kendala, tindakan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kegiatan atau operasional organisasi.

Sasaran jangka menengah Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026 adalah pertumbuhan produksi komoditas tanaman pangan dan hortikultura 2-5% per tahun. Dengan memperhatikan tujuan dan sasaran rencana Pembangunan Daerah Provinsi Tahun 2025-2029; Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai kewenangan daerah; serta mengidentifikasi permasalahan berdasarkan tugas fungsi Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura maka hasil telaah ditetapkan tujuan dan sasaran.

Adapun sasaran-sasaran Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan tahun 2025-2030 dirumuskan untuk masing-masing tujuan yang telah ditetapkan sebagai berikut:

III.3 Tujuan-Sasaran Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025-2030

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
Meningkatkan Kesejahteraan Petani Tanaman Pangan dan Hortikultura		Nilai Tukar Petani :						
		- Sub Sektor Tanaman Pangan	100,50	100,50	101,00	101,00	101,05	101,05
		- Sub Sektor Tanaman Hortikultura	100,00	100,05	100,10	100,15	100,20	100,25
	Meningkatnya Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura Strategis	Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Pangan :						
		- Padi (%)	2,71	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00
		- Jagung (%)	0,86	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50
		Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Hortikultura :						
		- Cabai Besar (%)	15,18	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00

Sedangkan untuk pembangunan pertanian diarahkan dapat meningkatkan kesejahteraan petani dengan meningkatkan ketahanan pangan dan daya saing pertanian. Salah satu tujuan utama pembangunan pertanian adalah meningkatkan kehidupan petani dan keluarganya yang lebih baik dan sejahtera. Hal tersebut bisa diraih dengan meningkatnya ketahanan pangan, nilai tambah dan daya saing pertanian. Kesejahteraan petani merupakan dampak (*impact*) dari tercapainya *outcome* program/kegiatan pembangunan pertanian.

Ketahanan pangan merupakan kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai perseorangan yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup ditinjau dari jumlah maupun mutu. Selain itu, menjamin pangan yang aman, beragam, bergizi, merata dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif secara berkelanjutan. Daya saing pertanian adalah kemampuan di *sector* pertanian untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sekaligus mampu menggantikan produk pesaingnya dengan nilai tambah yang

dihasilkan dalam setiap kegiatan produksi dan distribusi komoditas pertanian.

Ada 5 (lima) strategi pembangunan pertanian untuk mendukung ketahanan pangan dan peningkatan daya saing berkelanjutan, seperti peningkatan kapasitas produksi, diversifikasi pangan lokal, penguatan cadangan dan sistem logistik pangan, serta pengembangan pertanian modern, dan gerakan tiga kali ekspor. Kementerian Pertanian salah satunya akan mengembangkan Lahan Rawa di Sumatera Selatan menjadi areal tanam di tahun 2026 ini. Program Swasembada Pangan 2026 ini menjadi langkah strategis pemerintah dalam menjaga ketahanan pangan nasional dengan memaksimalkan pemanfaatan lahan yang ada serta memperluas cakupan sawah untuk mendukung target swasembada pangan di tahun 2026.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1. Faktor-faktor yang Menjadi Bahan Pertimbangan terhadap Rumusan Program dan Kegiatan

a. Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah

Pemerintah Provinsi Sumsel mendukung program Gerakan Sumsel Mandiri Pangan (GSMP) sejak 2021 untuk mengatasi masalah kerawanan pangan dan keterbatasan akses terhadap pangan yang bergizi dan aman. Ketahanan pangan merupakan pilar penting dalam pembangunan daerah yang berkelanjutan, berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat dan upaya pengentasan kemiskinan.

Peranan sektor pertanian bukan saja terhadap ketahanan pangan, tetapi juga memberikan andil yang cukup besar terhadap kesempatan kerja. Sektor pertanian merupakan sektor yang paling banyak menyerap tenaga kerja. Oleh karena itu, perkembangan sektor pertanian ke depan harus lebih di tingkatkan guna peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan.

Untuk itu, Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan menyusun Rencana Strategis (RENSTRA) yang merupakan dokumen perencanaan sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional sebagai Dokumen Perencanaan untuk Periode 5 (lima) Tahun dan Bersifat Indikatif sesuai dengan peran dan tupoksi dinas untuk mendukung visi, misi dan program prioritas Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024-2029.

Agenda utama Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan mendukung visi dan misi Gubernur terpilih diantaranya adalah :

1. Mewujudkan ketahanan ekonomi berbasis sumber daya lokal dan berkelanjutan dalam kerangka ekonomi kerakyatan yang berkeadilan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat.
2. Mewujudkan keterkaitan (nexus) yang kuat antara ketahanan pangan, ketahanan energi dan kedaulatan air sebagai upaya mengatasi perubahan iklim.

b. Pencapaian SDGs

SDGs singkatan dari *Sustainable Development Goals* adalah program pembangunan berkelanjutan yang disusun negara-negara anggota PBB pada 2015 dan diharapkan tercapai pada tahun 2030. SDGs dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang berisi 17 tujuan yang ingin dicapai untuk kesejahteraan masyarakat sekaligus tetap melestarikan lingkungan.

Lembaga-lembaga dan program-program di bawah PBB di Indonesia berkomitmen untuk memainkan peran yang signifikan dalam membantu Pemerintah Indonesia mencapai SDG dengan tiga modalitas utama, yaitu advokasi dan saran kebijakan, pembangunan kapasitas, dan berbagi pengetahuan. Terkait upaya mengakhiri kelaparan, mencapai keamanan pangan dan perbaikan gizi serta mempromosikan pertanian berkelanjutan, Pemerintah Indonesia akan mendapatkan manfaat dari kemitraan erat dengan FAO dan WFP dalam penguatan kapasitas untuk menjalankan seluruh target nasional yang terkait tujuan kedua SDG.

Dengan mengusung tema "Mengubah Dunia Kita: Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan", SDGs yang berisi 17 Tujuan dan 169 Target merupakan rencana aksi global untuk 15 tahun ke depan (berlaku sejak 2016 hingga 2030), guna mengakhiri

kemiskinan, mengurangi kesenjangan dan melindungi lingkungan. SDGs berlaku bagi seluruh negara (universal), sehingga seluruh negara tanpa kecuali negara maju memiliki kewajiban moral untuk mencapai tujuan dan target SDGs. Tujuan pembangunan berkelanjutan adalah serangkaian tujuan yang dibuat oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebagai panduan bagi seluruh negara anggota untuk mencapai pembangunan berkelanjutan.

Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan berada pada Tujuan ke 2 yaitu : Tanpa Kelaparan dengan sasaran mengakhiri kelaparan, menacapai ketahanan pangan dan perbaikan nutrisi serta mempromosikan pertanian yang berkelanjutan. Kelaparan disebabkan karena kurangnya konsumsi pangan kronis. Dalam jangka panjang, kelaparan kronis berakibat buruk pada derajat kesehatan masyarakat yang menyebabkan tingginya pengeluaran masyarakat untuk kesehatan. Target yang akan dicapai pada tahun 2030 pada point 2.3 yaitu menjamin pertanian pangan berkelanjutan, mengelola keragaman genetik, menggandakan produktivitas pertanian dan pendapatan produsen makanan skala kecil, khususnya perempuan, masyarakat penduduk asli, keluarga petani, penggembala dan nelayan, termasuk melalui akses yang aman dan sama terhadap lahan, sumber daya produktif, dan input lainnya, pengetahuan, jasa keuangan, pasar, dan peluang nilai tambah, dan pekerjaan non pertanian dengan indikator SDGs nya adalah Nilai Tukar Petani (NTP).

NTP merupakan salah satu indikator yang berguna untuk mengukur tingkat kesejahteraan petani karena mengukur kemampuan produk (komoditas) yang dihasilkan/dijual petani dibandingkan dengan produk yang dibutuhkan petani baik untuk proses produksi (usaha) maupun untuk konsumsi rumah tangga petani. Sejak Januari 2008, indeks harga yang diterima (IT) dan indeks harga yang dibayar petani (IB) serta NTP menggunakan tahun dasar 2007 dengan cakupan sebanyak 32 provinsi serta penyajian data untuk masing-masing sub sektor, sebelumnya

indeks harga yang diterima petani dan indeks harga yang dibayar petani serta NTP menggunakan tahun dasar 1993 dengan cakupan provinsi sebanyak 23 provinsi.

Data perkembangan Nilai Tukar Petani (NTP) bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS). NTP mempunyai kegunaan untuk mengukur kemampuan tukar produk yang dijual petani dengan produk yang dibutuhkan petani dalam produksi dan konsumsi rumah tangga. NTP merupakan perbandingan indeks harga komoditas pertanian yang diproduksi oleh petani (It) terhadap indeks harga barang/ jasa yang dibayar petani untuk keperluan konsumsi rumah tangga dan biaya produksi (Ib), merupakan salah satu indikator untuk melihat tingkat kemampuan/daya beli petani di daerah perdesaan.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 41 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan yang diundangkan di Palembang tanggal 18 November 2016 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan 2016 Nomor 41) pada BAB II pasal 2 Ayat (1) tertulis bahwasanya Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi di bidang pertanian sub urusan tanaman pangan dan hortikultura. Dan dengan mempertimbangkan hal tersebut, maka indikator tujuan Nilai Tukar Petani yang diampu oleh Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura hanya pada sub sektor tanaman pangan dan sub sektor tanaman hortikultura.

c. Pengentasan Kemiskinan

Tingkat kemiskinan di Sumatera Selatan mengalami penurunan dibandingkan tahun 2020 hingga 2025 (bulan Maret) baik di perkotaan maupun di pedesaan. Di Tahun 2020 persentase penduduk miskin sebesar 12,66% dan menurun di tahun 2025 (bulan Maret) menjadi 10,15% berdasarkan Data BPS Sumatera

Selatan. Jika dilihat dari kategori perkotaan dan pedesaan, persentase penduduk miskin di pedesaan (10,79%) lebih besar dibandingkan dengan perkotaan (9,10%).

Permasalahan kemiskinan di perdesaan yang umumnya bekerja di sektor pertanian mengindikasikan rendahnya produktivitas yang dihasilkan dari lapangan usaha sektor pertanian, yang disebabkan oleh rendahnya kepemilikan lahan, kurangnya pengetahuan dan keterampilan serta kurangnya modal usaha tani. Beberapa faktor yang dapat menyebabkan kemiskinan, antara lain: Laju pertumbuhan penduduk yang tinggi, Meningkatnya jumlah pengangguran, Pendidikan yang rendah, Terjadi bencana alam, Distribusi pendapatan yang tidak merata.

Tabel IV.1 Jumlah Penduduk Miskin Maret Menurut Kab/Kota (Ribuan Jiwa), 2025

Kabupaten/Kota 17	Jumlah Penduduk Miskin Maret Menurut Kab/Kota (Ribuan Jiwa) Tahun 2025
Sumatera Selatan	919,6
Ogan Komering Ulu	39,58
Ogan Komering Ilir	105,26
Muara Enim	64,82
Lahat	58,66
Musi Rawas	54,7
Musi Banyuasin	69,61
Banyuasin	77,63
Ogan Komering Ulu Selatan	35,49
Ogan Komering Ulu Timur	62,89
Ogan Ilir	53,21
Empat Lawang	27,88
Pali	18,87
Musi Rawas Utara	31,25
Palembang	162,31
Prabumulih	19,89
Pagar Alam	11,2
Lubuk Linggau	26,35

Sumber Data : Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan
Diperbaharui, 16 September 2025

Strategi Sektor Pertanian dalam upaya penurunan angka kemiskinan yang dilakukan oleh Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan adalah dengan cara peningkatan produksi dan produktivitas komoditi hortikultura melalui program dan kegiatan yaitu Perbaikan Luas Baku Sawah (LBS), Dukungan di Lokasi Kerangka Sampel Area (KSA), Kegiatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (*Food Estate*), Optimalisasi Petugas Pendamping Peningkatan Ekonomi Pertanian (PPEP), Perbaikan Data SIMLUHTAN dan Serapan KUR. Selain itu melalui Gerakan Sumsel Mandiri Pangan dengan adanya dukungan PPEP Pertanian sebanyak 1.400 orang.

Sasaran GSMP ini adalah RTM 12 persentil pada data DTKS. Persentil 12 ke atas ini masyarakat miskin dan hampir miskin, harus dijaga agar tidak jatuh miskin atau bertambah dalam dan parah kemiskinannya. Konsep **Gerakan Sumsel Mandiri Pangan (GSMP)** yaitu Kondisi Masyarakat yang Mempunyai KEMAMPUAN untuk mewujudkan ketahanan pangan dan gizi KELUARGA melalui pengembangan KETERSEDIAAN, DISTRIBUSI dan KONSUMSI pangan dengan memanfaatkan sumber daya setempat secara BERKELANJUTAN melalui Perubahan Pola Pikir dari KONSUMEN menjadi PRODUSEN (Herman Deru, 2021). Diharapkan dengan adanya gerakan GSMP ini dapat menurunkan angka kemiskinan di 17 Kab/Kota Se-Sumatera Selatan dan keluarga mandiri pangan dalam pemenuhan gizi keluarga.

4.2. Program dan Kegiatan Tahun 2026

Program dan kegiatan serta anggaran prioritas untuk pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2026 yaitu adalah Rp. 118.329.350.730,- yang terdiri dari 5 (lima) program dan 14 (empat belas) kegiatan yang bersumber dari dana APBD. Adapun rincian program dan kegiatan melalui dana APBD adalah sebagai berikut:

1. **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** dengan dana sebesar Rp. 56.185.753.000,-

Kegiatan:

- 1) **Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**, target Laporan Kinerja Tahunan (dok) sebesar 100% dengan dana sebesar Rp. 1.440.687.000,-
- 2) **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**, target Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran (%) sebesar 100% dengan dana sebesar Rp. 49.436.826.000,-
- 3) **Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**, target Persentase Layanan Kelancaran Administrasi Perkantoran (%) sebesar 100% dengan dana sebesar Rp. 130.000.000,-
- 4) **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**, target Persentase Pegawai yang Ditingkatkan Kapasitasnya (%) sebesar 100% dengan dana sebesar Rp. 150.000.000,-
- 5) **Administrasi Umum Perangkat Daerah**, target Persentase Layanan Kelancaran Administrasi Perkantoran (%) sebesar 100% dengan dana sebesar Rp. 1.863.240.000,-
- 6) **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**, target Persentase Layanan Kelancaran Administrasi Perkantoran (%) sebesar 100% dengan dana sebesar Rp. 1.780.000.000,-
- 7) **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**, target Persentase Layanan Kelancaran Administrasi Perkantoran (%) sebesar 100% dengan dana sebesar Rp. 1.385.000.000,-

2. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
dengan dana sebesar Rp. 35.143.597.730,-

Kegiatan:

- 1) Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian,** target Jumlah Pengawasan Peredaran Sarana TPH yang difasilitasi (dok) dengan dana sebesar Rp. 31.943.597.730,-
- 2) Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman,** target Jumlah Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih TPH yang Difasilitasi (dok) dengan dana sebesar Rp. 3.200.000.000,-

3. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian dengan dana sebesar Rp. 850.000.000,-

Kegiatan:

- 1) Penataan Prasarana Pertanian,** target Jumlah Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian yang difasilitasi (dok) dengan dana sebesar Rp. 850.000.000,-

4. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian dengan dana sebesar Rp. 400.000.000,-

Kegiatan:

- 1) Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi,** target Jumlah Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang difasilitasi (dok) serta Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan yang Difasilitasi (dok) dengan dana sebesar Rp. 400.000.000,-

5. Program Penyuluhan Pertanian dengan dana sebesar Rp. 25.750.000.000,-

Kegiatan :

- 1) Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian,** target Jumlah Ketenagaan Penyuluhan Pertanian yang Difasilitasi (Dok) dengan dana sebesar Rp. 200.000.000,-
- 2) Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian,** target Jumlah Penerapan Penyuluhan Pertanian yang Difasilitasi (Dok) dengan dana sebesar Rp. 25.350.000.000,-
- 3) Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan,** target Jumlah Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan yang Difasilitasi (Dok) dengan dana sebesar Rp 200.000.000,-

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan tahunan yang memuat program, kegiatan, dan target kinerja yang dirancang untuk mendukung pencapaian sasaran strategis jangka menengah dan dalam pelaksanaan penyusunan serta penetapan berbagai program dan kegiatan pembangunan ditujukan untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan produk perencanaan yang diukur berdasarkan sasaran-sasaran Pembangunan yang tertuang dalam Dokumen Rencana Strategis Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2030.

Rencana Kerja (RENJA) ini diharapkan dapat berfungsi sebagai pedoman dan arahan dalam melaksanakan dan mengendalikan kegiatan Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2026, sehingga tujuan dan sasaran yang hendak dicapai dapat lebih terarah dan terukur. Serta dapat memberikan pedoman dan arahan bagi *stakeholder* pembangunan pertanian untuk lebih mudah berperan aktif dalam pembangunan. Lebih dari itu dengan adanya Dokumen Renja ini akan dapat menjadi sarana dalam mewujudkan akuntabilitas Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan dalam memberikan pelayanan publik, sekaligus meningkatkan kinerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya.

Pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) mensyaratkan pentingnya keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan, baik di dalam satu program ataupun antar program dengan tetap memperhatikan peran, tanggungjawab dan tugas yang melekat pada Pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota, sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku. Rencana Kerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026 merupakan dasar evaluasi kinerja dan laporan akuntabilitas bagi pengukuran kinerja kegiatan maupun pencapaian sasaran program serta kegiatan Dinas Tahun 2026. Adapun keberhasilan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah direncanakan ini bergantung kepada profesionalitas, sikap mental, semangat dan budaya kerja, ketaatan, disiplin, serta komitmen yang tinggi.

Selanjutnya kami menyadari bahwa Rencana Kerja Tahunan yang kami susun ini jauh dari sempurna, maka kami dengan segala kerendahan hati mengharapkan koreksi dan masukan dari berbagai pihak untuk penyempurnaan perencanaan dimasamasa yang akan datang.

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah</i>				1 Data	350.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD 3 : Meni ngkatkan k etangguhan daerah dengan mendorong ketahanan pangan, energi, air, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		200.000.000,00	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3.27.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	49.436.826.000,00			-	PD 3 : Meni ngkatkan k etangguhan daerah dengan mendorong ketahanan pangan, energi, air, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	-	50.533.412.000,00	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3.27.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>				418 Orang/ Bulan	47.107.132.000,00	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Ogan Komerling Ulu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD 3 : Meni ngkatkan k etangguhan daerah dengan mendorong ketahanan pangan, energi, air, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		47.107.132.000,00	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3.27.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</i>				5 Dokumen	2.122.554.000,00	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Ogan Komerling Ulu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD 3 : Meni ngkatkan k etangguhan daerah dengan mendorong ketahanan pangan, energi, air, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		3.219.140.000,00	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.27.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				5 Dokumen	121.300.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD 3 : Meni ngkatkan k etangguhan daerah dengan mendorong ketahanan pangan, energi, air, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		121.300.000,00	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3.27.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	46.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD 2 : Meni ngkatkan ketahanan ekonomi berbasis sumber daya lokal yang berdaya saing dan b erkelanjuta n dalam kerangka ekonomi kerakyatan yang berkeadilan serta hilirisasi dan industri alisasi untuk meni ngkatkan pendapatan masyarakat	-		46.000.000,00	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3.27.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				3 Laporan	39.840.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD 2 : Meningkatkan ketahanan ekonomi berbasis sumber daya lokal yang berdaya saing dan berkelanjutan dalam kerangka ekonomi kerakyatan yang berkeadilan serta hilirisasi dan industri alisasi untuk meningkatkan pendapatan masyarakat	-		39.840.000,00	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3.27.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-			-	130.000.000,00			-	PD 3 : Meningkatkan ketangguhan daerah dengan mendorong ketahanan pangan, energi, air, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	-	7.555.000.000,00	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3.27.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	75.000.000,00	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Ogan Komering Ulu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD 3 : Meningkatkan ketangguhan daerah dengan mendorong ketahanan pangan, energi, air, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		7.500.000.000,00	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3.27.01.1.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD</i>				1 Laporan	55.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD 3 : Meni ngkatkan k etangguhan daerah dengan mendorong ketahanan pangan, energi, air, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		55.000.000,00	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3.27.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	150.000.000,00			-	PD 3 : Meni ngkatkan k etangguhan daerah dengan mendorong ketahanan pangan, energi, air, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	-	350.000.000,00	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3.27.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya														
			<i>Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan</i>				450 Paket	0,00	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Ogan Komeri ng Ulu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD 3 : Meni ngkatkan k etangguhan daerah dengan mendorong ketahanan pangan, energi, air, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		200.000.000,00	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3.27.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			<i>Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan</i>				10 Orang	150.000.000,00	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Ogan Komeri ng Ulu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD 3 : Meni ngkatkan k etangguhan daerah dengan mendorong ketahanan pangan, energi, air, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		150.000.000,00	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.27.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	1.863.240.000,00			-	PD 3 : Meni ngkatkan k etangguhan daerah dengan mendorong ketahanan pangan, energi, air, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	-	2.123.240.000,00	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3.27.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	140.000.000,00	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Ogan Komering Ulu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD 3 : Meni ngkatkan k etangguhan daerah dengan mendorong ketahanan pangan, energi, air, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		50.000.000,00	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3.27.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	0,00	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Ogan Komering Ulu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD 3 : Meni ngkatkan k etangguhan daerah dengan mendorong ketahanan pangan, energi, air, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		400.000.000,00	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3.27.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				3 Paket	377.800.000,00	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Ogan Komering Ulu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD 3 : Meningkatkan ketangguhan daerah dengan mendorong ketahanan pangan, energi, air, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		327.800.000,00	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3.27.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	50.000.000,00	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Ogan Komering Ulu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD 3 : Meningkatkan ketangguhan daerah dengan mendorong ketahanan pangan, energi, air, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		50.000.000,00	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3.27.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	55.000.000,00	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Ogan Komering Ulu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD 3 : Meningkatkan ketangguhan daerah dengan mendorong ketahanan pangan, energi, air, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		55.000.000,00	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3.27.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				1 Laporan	1.140.440.000,00	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD 3 : Meni ngkatkan k etangguhan daerah dengan mendorong ketahanan pangan, energi, air, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		1.140.440.000,00	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3.27.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD</i>				1 Dokumen	100.000.000,00	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD 3 : Meni ngkatkan k etangguhan daerah dengan mendorong ketahanan pangan, energi, air, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		100.000.000,00	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3.27.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	0,00			-	PD 3 : Meni ngkatkan k etangguhan daerah dengan mendorong ketahanan pangan, energi, air, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	-	1.359.500.000,00	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3.27.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			<i>Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan</i>				2 Unit	0,00	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD 3 : Meni ngkatkan k etangguhan daerah dengan mendorong ketahanan pangan, energi, air, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		1.359.500.000,00	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.27.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	1.780.000.000,00			-	PD 3 : Meni ngkatkan k etangguhan daerah dengan mendorong ketahanan pangan, energi, air, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	-	1.675.000.000,00	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3.27.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>				1 Laporan	5.000.000,00	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Ogan Komerling Ulu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD 3 : Meni ngkatkan k etangguhan daerah dengan mendorong ketahanan pangan, energi, air, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		5.000.000,00	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3.27.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				1 Laporan	1.775.000.000,00	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Ogan Komerling Ulu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD 3 : Meni ngkatkan k etangguhan daerah dengan mendorong ketahanan pangan, energi, air, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		1.670.000.000,00	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3.27.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	1.385.000.000,00			-	PD 3 : Meni ngkatkan k etangguhan daerah dengan mendorong ketahanan pangan, energi, air, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	-	1.385.000.000,00	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3.27.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				253 Unit	625.000.000,00	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Ogan Komerling Ulu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD 3 : Meni ngkatkan k etangguhan daerah dengan mendorong ketahanan pangan, energi, air, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		625.000.000,00	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3.27.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				135 Unit	160.000.000,00	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Ogan Komerling Ulu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD 3 : Meni ngkatkan k etangguhan daerah dengan mendorong ketahanan pangan, energi, air, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		160.000.000,00	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3.27.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	600.000.000,00	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Ogan Komerling Ulu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD 3 : Meni ngkatkan k etangguhan daerah dengan mendorong ketahanan pangan, energi, air, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		600.000.000,00	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
2.	3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	-	-			-	35.143.597.730,00						-	32.459.798.457,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.27.02.1.01	Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	-	-			-	31.943.597.730,00			Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD 3 : Meni ngkatkan k etangguhan daerah dengan mendorong ketahanan pangan, energi, air, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	-	28.843.798.457,00	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3.27.02.1.01.0001	Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian														
			Jumlah Pengawasan Ketersediaan dan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian				6 Laporan	30.954.639.215,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD 3 : Meni ngkatkan k etangguhan daerah dengan mendorong ketahanan pangan, energi, air, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		27.854.839.942,00	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3.27.02.1.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian														
			Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian				2 Dokumen	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD 3 : Meni ngkatkan k etangguhan daerah dengan mendorong ketahanan pangan, energi, air, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		200.000.000,00	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3.27.02.1.01.0004	Pengawasan Sebaran Sarana Pascapanen Tanaman Pangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah pengawasan ketersediaan dan sebaran sarana pascapanen tanaman pangan				3 laporan	588.958.515,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD 3 : Meningkatkan ketangguhan daerah dengan mendorong ketahanan pangan, energi, air, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		588.958.515,00	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3.27.02.1.01.0006	Pengawasan Sebaran Sarana Pascapanen Hortikultura														
			Jumlah pengawasan ketersediaan dan sebaran sarana pascapanen hortikultura				1 laporan	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD 3 : Meningkatkan ketangguhan daerah dengan mendorong ketahanan pangan, energi, air, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		50.000.000,00	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3.27.02.1.01.0007	Pengawasan Sebaran Sarana Pengolahan Hasil Hortikultura														
			Jumlah pengawasan ketersediaan dan sebaran sarana pengolahan hasil hortikultura				1 laporan	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD 3 : Meningkatkan ketangguhan daerah dengan mendorong ketahanan pangan, energi, air, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		50.000.000,00	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3.27.02.1.01.0008	Pengawasan Sebaran Sarana Pengolahan Hasil Tanaman Pangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah pengawasan ketersediaan dan sebaran sarana pengolahan hasil tanaman pangan</i>				1 laporan	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD 3 : Meningkatkan ketangguhan daerah dengan mendorong ketahanan pangan, energi, air, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		100.000.000,00	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3.27.02.1.02	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	-	-			-	3.200.000.000,00			-	PD 3 : Meningkatkan ketangguhan daerah dengan mendorong ketahanan pangan, energi, air, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	-	3.616.000.000,00	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3.27.02.1.02.0001	Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih														
			<i>Jumlah Sertifikat Benih</i>				20 Sertifikat	250.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD 3 : Meningkatkan ketangguhan daerah dengan mendorong ketahanan pangan, energi, air, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		666.000.000,00	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3.27.02.1.02.0007	Perbanyak Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Batang														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah benih bersertifikat hortikultura Berbentuk Batang yang diperbanyak				0 Batang	1.700.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD 3 : Meni ngkatkan k etangguhan daerah dengan mendorong ketahanan pangan, energi, air, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		1.700.000.000,00	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3.27.02.1.02.0013	Perbanyak Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih														
			Jumlah benih bersertifikat tanaman pangan berbentuk biji/benih yang diperbanyak				24 Ton	350.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD 2 : Meni ngkatkan ketahanan ekonomi berbasis sumber daya lokal yang berdaya saing dan b erkelanjuta n dalam kerangka ekonomi kerakyatan yang berkeadilan serta hilirisasi dan industri alisasi untuk meni ngkatkan pendapatan masyarakat	-		350.000.000,00	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3.27.02.1.02.0018	Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Tanaman Pangan														
			Jumlah benih unggul bersertifikat tanaman pangan yang terawasi, tersedia dan beredar yang memenuhi standar mutu yang ditetapkan sesuai sasaran 6 tepat, yaitu tepat jenis/varietas, mutu, jumlah, waktu, tempat, dan harga				2 Laporan	250.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD 3 : Meni ngkatkan k etangguhan daerah dengan mendorong ketahanan pangan, energi, air, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		250.000.000,00	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3.27.02.1.02.0019	Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Tanaman Hortikultura														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah benih unggul bersertifikat tanaman Hortikultura yang terawasi, tersedia dan beredar yang memenuhi standar mutu yang ditetapkan sesuai sasaran 6 tepat, yaitu tepat jenis/varietas, mutu, jumlah, waktu, tempat, dan harga				3 Laporan	650.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD 3 : Meningkatkan ketangguhan daerah dengan mendorong ketahanan pangan, energi, air, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		650.000.000,00	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
3.	3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	-	-			-	850.000.000,00						-	850.000.000,00	
	3.27.03.1.01	Penataan Prasarana Pertanian	-	-			-	850.000.000,00			-	PD 3 : Meningkatkan ketangguhan daerah dengan mendorong ketahanan pangan, energi, air, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	-	850.000.000,00	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3.27.03.1.01.0001	Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian														
			Jumlah Rencana Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian				1 Dokumen	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD 3 : Meningkatkan ketangguhan daerah dengan mendorong ketahanan pangan, energi, air, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		100.000.000,00	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3.27.03.1.01.0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani				1 Dokumen	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD 3 : Meni ngkatkan k etangguhan daerah dengan mendorong ketahanan pangan, energi, air, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		200.000.000,00	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3.27.03.1.01.0009	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya														
			Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya				1 Laporan	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD 3 : Meni ngkatkan k etangguhan daerah dengan mendorong ketahanan pangan, energi, air, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		150.000.000,00	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3.27.03.1.01.0010	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya														
			Jumlah Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Dipelihara dan Direhabilitasi				4 Unit	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD 3 : Meni ngkatkan k etangguhan daerah dengan mendorong ketahanan pangan, energi, air, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		100.000.000,00	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3.27.03.1.01.0016	Penyusunan Peta Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di tingkat Provinsi														
			Peta Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di tingkat Provinsi				1 Dokumen	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD 3 : Meni ngkatkan k etangguhan daerah dengan mendorong ketahanan pangan, energi, air, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		150.000.000,00	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.27.03.1.01.0018	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di tingkat Provinsi														
			Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang dikelola di tingkat Provinsi				1 Dokumen	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD 3 : Meningkatkan ketangguhan daerah dengan mendorong ketahanan pangan, energi, air, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		150.000.000,00	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
4.	3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	-	-			-	400.000.000,00						-	400.000.000,00	
	3.27.05.1.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	-	-			-	400.000.000,00			-	PD 3 : Meningkatkan ketangguhan daerah dengan mendorong ketahanan pangan, energi, air, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	-	400.000.000,00	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3.27.05.1.01.0001	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan														
			Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan				1000 Ha	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD 3 : Meningkatkan ketangguhan daerah dengan mendorong ketahanan pangan, energi, air, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		200.000.000,00	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3.27.05.1.01.0002	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani				400 Ha	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD 3 : Meni ngkatkan k etangguhan daerah dengan mendorong ketahanan pangan, energi, air, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		200.000.000,00	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
5.	3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	-	-			-	25.750.000.000,00						-	26.100.000.000,00	
	3.27.07.1.01	Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian	-	-			-	200.000.000,00			-	PD 3 : Meni ngkatkan k etangguhan daerah dengan mendorong ketahanan pangan, energi, air, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	-	550.000.000,00	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3.27.07.1.01.0004	Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian														
			Jumlah penyuluh pertanian yang tersedia dan ditingkatkan kapasitasnya				60 Orang	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD 3 : Meni ngkatkan k etangguhan daerah dengan mendorong ketahanan pangan, energi, air, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		550.000.000,00	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3.27.07.1.02	Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	-	-			-	25.350.000.000,00			-	PD 3 : Meni ngkatkan k etangguhan daerah dengan mendorong ketahanan pangan, energi, air, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	-	25.350.000.000,00	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3.27.07.1.02.0001	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian				2 Dokumen	350.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD 3 : Meni ngkatkan k etangguhan daerah dengan mendorong ketahanan pangan, energi, air, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		350.000.000,00	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3.27.07.1.02.0002	Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani														
			Jumlah Kelompok Petani yang Mendapat Penyuluhan dan Pemberdayaan				1300 Kelompok	25.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD 3 : Meni ngkatkan k etangguhan daerah dengan mendorong ketahanan pangan, energi, air, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		25.000.000.000,00	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3.27.07.1.03	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan	-	-			-	200.000.000,00			-	PD 3 : Meni ngkatkan k etangguhan daerah dengan mendorong ketahanan pangan, energi, air, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	-	200.000.000,00	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3.27.07.1.03.0006	Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Korporasi Petani														
			Jumlah korporasi petani yang dibentuk dan beroperasi				1 Unit	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD 3 : Meni ngkatkan k etangguhan daerah dengan mendorong ketahanan pangan, energi, air, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		200.000.000,00	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	J U M L A H							118.329.350.730,00							125.930.950.457,00	